

Sujarwo
Trisanti
Erma Kusumawardani

UNY
PRESS

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekoliterasi



**PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BERBASIS
EKOLITERASI**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS EKOLITERASI

**Sujarwo
Trisanti
Erma Kusumawardani**



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS EKOLITERASI

© Sujarwo, Trisanti, Erma Kusumawardani. 2024

Penulis : **Sujarwo**
Trisanti
Erma Kusumawardani

Tata Letak : Kirman
Cover : Ngadimin

Diterbitkan dan dicetak oleh **UNY PRESS**

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp : 0274–589346

E-Mail : unypenerbitan@uny.ac.id

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

16 x 23 cm, x + 148 hlm.

ISBN : 978-602-498-663-6

Cetakan Pertama, Januari 2024

@ Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Masyarakat merupakan bagian dari subjek pembangunan masyarakat. Salah satu proses pembangunan masyarakat dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Munculnya program pemberdayaan bagi masyarakat seringkali karena adanya kondisi masyarakat yang belum sejahtera sehingga mereka kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kehidupan masyarakat sebenarnya selalu di-*support* atau didukung oleh lingkungan sekitarnya, hanya saja apakah masyarakat itu sendiri merespon positif atau tidak. Jika masyarakat mampu merespon secara positif maka berbagai kondisi lingkungan yang mendampingi manusia akan menjadi sumber penghasilan yang tidak ada habisnya. Namun demikian sebaliknya, apabila masyarakat tidak mampu merespon positif terkait kondisi lingkungan maka mereka akan selalu hidup dalam keterbatasan, sehingga mereka tidak dapat mengakses berbagai sumber daya yang ada.

Keterbatasan kondisi masyarakat dalam mengakses sumber daya perlu mendapat perhatian. Bisa jadi keterbatasan mereka karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengakses sumber daya tersebut. Lebih fatalnya lagi mereka tidak menyadari akan potensi yang dimiliki dan tidak mampu melihat potensi lingkungan yang ada yang bisa dijadikan sebagai sumber penghidupan. Berbagai kondisi di atas dapat muncul karena berbagai alasan salah satunya adalah program pemberdayaan yang tidak diawali dengan tahapan analisis potensi dan penyadaran kepada masyarakat. Selain itu program pemberdayaan tidak diakhiri dengan tahapan pendampingan. Masyarakat secara tiba-tiba mendapatkan program yang sifatnya *top down*, tanpa melihat potensi yang dimiliki serta potensi sumber daya alam yang ada. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan seringkali berhenti setelah program tersebut selesai. Pemberdayaan diimplementasikan sebagai program pelatihan yang dilakukan dalam waktu singkat dan berharap mendapatkan hasil yang berkelanjutan. Dampak dari program pemberdayaan ini adalah hanya akan memberikan sifat ketergantungan masyarakat dengan lembaga pemberi program. Masyarakat akan selalu menanti-nanti program yang serupa tetapi lupa bagaimana melanjutkan serta mengembangkan pengetahuan yang sudah didapatkan untuk keberlanjutan dalam menyelesaikan permasalahan.

Untuk mengatasi kondisi di atas, masyarakat membutuhkan kemampuan dalam mengolah berbagai informasi secara cerdas yang dalam hal ini dinamakan sebagai literasi. Literasi dalam program pemberdayaan dianggap sebagai salah satu intervensi yang mampu memberikan perubahan karena menuntut masyarakat untuk mampu mengolah informasi dengan baik sehingga informasi tersebut dapat

digunakan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Salah satu program literasi yang relevan dengan kondisi saat ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat adalah literasi lingkungan atau disebut sebagai *ecoliteracy*.

Konsep yang diberikan dalam *ecoliteracy* adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap bekerjanya prinsip-prinsip ekologis dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat mencapai tingkat kesadaran tinggi mengenai pentingnya lingkungan. Kondisi lingkungan selama ini hanya dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tanpa melihat keberlanjutan dari fungsi lingkungan tersebut. Oleh karena itu, meleak lingkungan saat ini menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. *Ecoliteracy* mengajarkan masyarakat untuk berempati terhadap lingkungan secara seimbang terhadap apa yang sudah diberikan oleh lingkungan kepada manusia atau masyarakat. Masyarakat juga semakin memahami semua bentuk kehidupan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait peran alam bagi manusia atau masyarakat yang selama ini telah menopang kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui *ecoliteracy* dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan untuk tetap menjadi asset dalam kehidupan manusia. Berbagai sumber kehidupan manusia bersumber dari alam, sehingga sudah selayaknya manusia atau masyarakat melihat alam secara positif dan memanfaatkannya secara bijak. Dampak positif bagi kehidupan masyarakat adalah masyarakat memiliki sikap yang positif terhadap kondisi alam yang terjadi, peduli terhadap berbagai hal yang menimbulkan kerusakan

lingkungan karena masyarakat menyadari bahwa kehidupan yang dijalani saat ini adalah bersumber dari alam, memberikan ruang bagi alam untuk terus tumbuh berkelanjutan tanpa ada gangguan dari manusia.

Program pemberdayaan melalui *ecoliteracy* tidak hanya berhenti pada dampak yang dirasakan saat ini oleh masyarakat tetapi juga memikirkan untuk dampak ke depan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus dilanjutkan dengan tahapan pendampingan agar kemampuan dan keterampilan yang sudah dimiliki oleh masyarakat tidak hilang begitu saja tetapi semakin meluas karena adanya interaksi dengan berbagai pihak. Lingkungan yang mendapat respon baik, juga akan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan manusia di masa datang. Dengan demikian, masyarakat dengan lingkungan saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain.

Daftar Isi

Prakata — *v*

Daftar Isi — *ix*

Bab I Kondisi Masyarakat — 1

Pengertian Masyarakat — 1

Faktor-faktor yang Memengaruhi Problematika
Masyarakat — 5

Bentuk-bentuk Problematika masyarakat — 9

Bab II Pemberdayaan Masyarakat — 13

A. Pengertian Pemberdayaan — 13

B. Pemberdayaan Masyarakat — 16

C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat — 17

**Bab III Komponen-Komponen Pemberdayaan
Masyarakat — 29**

A. Pemberdayaan Masyarakat suatu Sistem — 29

B. Komponen Pemberdayaan Masyarakat — 31

Bab IV	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat — 37
Bab V	Tantangan Pemberdayaan Masyarakat — 49
	Arah program pemberdayaan masyarakat — 50
	Tantangan Pemberdayaan Masyarakat — 52
Bab VI	Konsep Ekoliterasi — 61
	A. Landasan Filosofis Ekologi — 61
	B. Sejarah Perkembangan Ekologi — 64
	C. Prinsip Ekologi — 66
	D. Konsep Ekoliterasi — 71
Bab VII	Program Pemberdayaan Berbasis Ekoliterasi — 75
Bab VIII	Pendekatan Pemberdayaan Berbasis Ekoliterasi — 81
Bab IX	Implementasi Pemberdayaan Berbasis Ekoliterasi — 89
	A. Latar Belakang — 93
	B. Tujuan — 96
	C. Materi Ajar — 99
	D. Metode Belajar — 100
	E. Media Ajar — 101
	F. Evaluasi — 101
Bab X	Studi Kasus Pemberdayaan Berbasis Ekoliterasi — 103

Daftar Pustaka — 141

Bab I

Kondisi Masyarakat

Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang menempati wilayah tertentu, yang melakukan interaksi, diikat oleh norma untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Setiap individu memiliki peran ganda dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk monodualistik, baik berperan sebagai makhluk individu maupun sosial. Secara individu, anggota masyarakat memiliki kemampuan yang terbaik pada dirinya untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Kehadiran orang lain dan lingkungan memberikan fasilitas untuk mengakselerasi perkembangan yang lebih baik. Untuk menentukan identitasnya, masyarakat mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai berikut:

1. Hidup berkelompok, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Ketidakmampuan itu mendorong manusia hidup berkelompok.

Konsep tersebut mengantarkan masing-masing individu hidup bermasyarakat.

2. Melahirkan kebudayaan, ketika manusia membentuk kelompok dalam kehidupannya, manusia akan berupaya menyatukan pikiran dan pengalaman bersama menjadi dapat menjadi pedoman tingkah laku mereka, yakni kebudayaan. Selanjutnya, budaya itu dipelihara dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.
3. Mengalami perubahan, dinamika kehidupan masyarakat yang beragam latar belakang yang menyatukan tiap-tiap individu menjadi suatu masyarakat, membuat manusia mengalami perubahan. Perubahan ini dianggap sebagai upaya masyarakat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
4. Berinteraksi, interaksi antar anggota masyarakat merupakan proses yang mendasar dari terbentuknya masyarakat. Interaksi dilakukan antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan, baik dilakukan secara pribadi maupun secara kolektif. Melalui proses interaksi, masyarakat akan membentuk suatu entitas sosial yang dinamis.
5. Kepemimpinan, anggota masyarakat cenderung mengikuti nilai atau norma yang diberlakukan di wilayahnya sehingga dalam mengamalkan norma dan nilai dalam kehidupannya disepakati adanya figur yang diikuti. Hal itu menunjukkan bahwa dalam masyarakat, ada peran pemimpin yang membantu menyatukan individu-individu.
6. Stratifikasi sosial, menempatkan seseorang pada kedudukan dan perannya di dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut

menimbulkan adanya penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu (Soerjono Soekanto, 2012).

Selanjutnya dilihat dari perkembangan peradabannya, jenis masyarakat dikelompokkan ke dalam kelompok masyarakat modern dan masyarakat tradisional, Masyarakat modern adalah masyarakat yang telah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perkembangan peradaban modern, yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi lompatan perubahan yang sering tidak direncanakan, dan sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Dalam masyarakat modern, kebiasaan lama dan adat istiadat dianggap dapat menghambat kemajuan. Masyarakat modern lebih memilih mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan, tata kehidupannya lebih rasional dan lebih banyak memanfaatkan teknologi sebagai media dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang dalam kehidupannya masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun temurun. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat tradisional belum banyak menerima kehadiran perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya termasuk dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Salah satu yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat tradisional terhadap adat istiadat, nilai-nilai di masyarakat dan alam yang ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Secara geografis, masyarakat modern berada di perkotaan dan sekitarnya, sedangkan masyarakat tradisional berada di pedesaan bahkan di pedalaman.

Anggota masyarakat dalam suatu komunitas di pedesaan memiliki hubungan yang lebih erat antara satu individu dengan individu lainnya. Mereka juga memiliki sistem kekeluargaan yang kuat, kegotongroyongan yang baik, meskipun dapat dikatakan sebagai saudara jauh. Beberapa keturunan, masih mengalir darah keluarga, hubungan mereka masih sangat dekat. Satu sama yang lain masih ada rasa kepedulian dan kasih sayang. Saling menolong, saling gotong royong, saling membantu dan saling melindungi. Kondisi ini terjadi pada masyarakat desa yang masih memegang teguh adat-istiadat, sistem nilai sosial yang kuat, menjunjung tinggi adab ketimuran, dan perilaku yang santun. Masyarakat di desa sebagian besar bekerja dalam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Mereka yang bekerja dalam sektor pertanian dikarenakan potensi wilayahnya berupa daerah pertanian berupa persawahan yang bisa ditanami padi dan tanaman sayuran lainnya. Ada sebagian masyarakat yang bekerja dalam sektor perkebunan dikarenakan wilayahnya berupa daerah perkebunan seperti perkebunan tembakau, perkebunan teh, perkebunan kakao, dan lain sebagainya.

Masyarakat pedesaan ada Sebagian yang bekerja dalam sektor perikanan dikarenakan wilayahnya berupa daerah pantai sehingga pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai nelayan, namun seiring perkembangan mobilitas manusia, banyak kondisi yang berubah dalam masyarakat pedesaan. Masyarakat yang awalnya bekerja dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan tidak menutup kemungkinan pekerjaan bergeser menjadi pedagang, Dalam kehidupan masyarakat sering ditemukan berbagai permasalahan dan tantangan. Untuk itu perlu dirumuskan pemahaman mengenai istilah masalah masyarakat Sebagian orang menyebut masalah

sosial. Permasalahan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan individu dan kelompok sosial. Terjadinya ketidaksesuaian atau kesenjangan antar unsur-unsur masyarakat dalam mewujudkan tujuan masyarakat. Masalah sosial timbul akibat dari kurang adanya jalinan dan interaksi sosial yang baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Untuk itu diperlukan upaya yang strategis sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Permasalahan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012). Permasalahan sosial adalah situasi, kondisi dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat dalam kehidupannya, sebagai pedoman dan acuan suatu tindakan masyarakat untuk mengubah situasi tersebut.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Problematika Masyarakat

Untuk mencapai tujuan sebagai masyarakat yang makmur, damai, bahagia, aman, dan sejahtera banyak faktor yang memengaruhinya, sehingga sering menimbulkan masalah sosial. Faktor-faktor tersebut diantaranya; 1) faktor ekonomi, 2) faktor budaya, 3) faktor biologis, 4) faktor geografis, 5) faktor psikologis. Masing-masing dipaparkan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Tingkat pendapatan, tingkat pemenuhan kebutuhan, ketersediaan lapangan pekerjaan,

tingkat pengangguran, kemiskinan dan kompleksitas tuntutan kehidupan masalah merupakan bagian dari masalah sosial yang ditimbulkan dari faktor ekonomi. Adanya krisis global, kesenjangan pendapatan, kesenjangan pemilikan aset dan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat memicu timbulnya tindak kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. Faktor ekonomi sering menjadi pemicu awal munculnya permasalahan sosial politik pada aspek psikologis dan biologis masyarakat.

2. Faktor Budaya

Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Hubungan manusia dan kebudayaan meliputi kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerah dan pola interaksi antar anggota masyarakat. Cara dan pola hidup masyarakat di kota dan desa yang berbeda. Masing-masing masyarakat memiliki kekhasan dan corak kebudayaan yang khusus. Hubungan antar manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat dinyatakan sebagai alektis (saling terkait satu sama lain). Nilai-nilai budaya yang memengaruhi masyarakat, menurut Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul “*Variations in Value Orientation*” bahwa sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia sebenarnya mengenai 5 (lima) masalah pokok dalam kehidupan manusia, yaitu:

- a. Hakikat hidup, hidup itu baik dan buruk, sehingga masyarakat harus berikhtiar
- b. Hakikat karya untuk mencari nafkah, meraih kehormatan, kedudukan dan selalu berinovasi melalui karya nyata.
- c. Persepsi manusia tentang waktu, dalam hidup bermasyarakat di peruntukan untuk masalah kini, melihat masalah lalu dan merencanakan untuk masa depan.
- d. Pandangan manusia terhadap alam, mensyukuri potensi dan kondisi alam yang diberikan tuhan untuk mencukupi kebutuhan hidup, mengelola, menjaga dan memanfaatkan untuk kemaslahatan.
- e. Hakikat hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia sebagai makhluk monodualisme hendaknya dapat menjaga keserasian dan keselarasan hubungan antar anggota masyarakat, dan juga hubungan dengan sang pencipta (Allah SWT), Nilai-nilai budaya tersebut jika tidak dilaksanakan dengan baik sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

3. Faktor Biologi

Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Kurang gizi juga merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ini. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan

masyarakat yang tidak mencukupi. Beberapa faktor yang bisa menimbulkan masalah sosial karena faktor biologis adalah: 1) konsumsi masyarakat, 2) masalah kependudukan, 3) lingkungan, 4) ekosistem, dan 5) kebutuhan biologis.

4. Faktor Geografis

Masalah kondisi alam juga memberikan andil yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Struktur kehidupan masyarakat, struktur kehidupan masyarakat, struktur dan kondisi alam, lokasi dan jangkauan komunikasi masyarakat. Iklim dan cuaca yang terjadi di lingkungan masyarakat sering berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Faktor geografis yang memengaruhi munculnya masalah sosial diantaranya: kedekatan dengan pusat-pusat kota, persebaran pusat-pusat kegiatan manusia, jarak dari pusat-pusat pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan), aksesibilitas wilayah atau rute jalan, mobilitas penduduk, interaksi dengan wilayah lain.

5. Faktor Psikologi

Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Pola pikir berkaitan erat dengan sikap dan perilaku seseorang dalam memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Berangkat dari sikap, cara pandang dan perilaku anggota masyarakat dalam mengelola emosi, mengelola hati dan diri dalam memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Faktor psikologi menjadi penyebab terjadinya permasalahan sosial, apabila pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam mensikapi beban hidup yang dialami suatu masyarakat terlalu berat, tuntutan kebutuhan

masyarakat yang kompleks, gangguan psikologi atau pola pikir masyarakat yang menjauh dari kenormalan, dan ketidakstabilan emosi dalam menghadapi masalah. Kemampuan anggota masyarakat mengelola hati dan emosi dalam mensikapi dan merespon stimulus sangat memengaruhi munculnya intensitas problematika yang dialami.

Bentuk-bentuk Problematika masyarakat

Masyarakat memiliki hubungan yang sangat dekat seperti keluarga sehingga berbagai aktivitas yang seharusnya bernilai ekonomi hanya dianggap sebagai kebutuhan sosial antar sesama. Kondisi demikian sering menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan, sehingga menjadi suatu kebutuhan yang harus diwujudkan agar tidak menimbulkan masalah.

Contoh sederhana, kebutuhan sosial tersebut dianggap sebagai kebutuhan saling bergantian atau dalam bahasa jawa dikenal dengan kata “*genten*” yang artinya semua keluarga akan memiliki hajat, oleh karena itu tenaga yang dikeluarkan untuk saling membantu dalam hajatan tidak dibayar secara ekonomi, tetapi akan dibayar ketika bergantian mempunyai hajat yang serupa. Padahal masyarakat terkadang harus meninggalkan pekerjaannya yang statusnya bekerja sebagai buruh tani karena masih mempertahankan prinsip “*genten*”

tadi. Jika tidak membantu dirinya khawatir nantinya tidak akan dibantu ketika memiliki hajat. Sifat genten yang muncul dalam kehidupan masyarakat tersebut sebenarnya sebagai wujud dalam sikap gotong royong, dimana segala bentuk aktivitas dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa ada imbalan dalam bentuk materi. Sikap gotong royong tersebut merupakan sebuah kelembagaan yang sengaja dibuat oleh masyarakat, sehingga dalam komunitas masyarakat di pedesaan jarang ditemui pembagian kerja berdasarkan pada keahlian, tetapi biasanya didasarkan pada usia dan jenis kelamin (Nasdian, 2014).

Hajatan di pedesaan jika diidentifikasi cukup bervariasi yaitu: (1) tahlilan bagi orang yang sudah meninggal (7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun); (2) selamatan bagi ibu hamil mulai dari 4 bulan, 7 bulan sampai bayi lahir ke dunia; (3) orang menikah yang memakan waktu hampir 1 minggu untuk persiapannya; (4) khitanan anak yang juga memakan waktu sekitar 1 minggu; (5) acara merti dusun; (6) rasulan; (7) perayaan Maulid Nabi Muhammad; (8) pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut masih kuat bagi masyarakat pedesaan untuk dilestarikan. Sementara pekerjaan masyarakat desa sebagian besar belum menghasilkan penghasilan yang tetap setiap bulannya. Kondisi demikian masyarakat tetap harus mengeluarkan uang untuk kegiatan-kegiatan tersebut yang terkadang tidak banyak diantaranya harus mengambil hutang ke tetangga yang ekonominya lebih baik atau menjual hasil pertanian.

Komunitas masyarakat kota berbeda dengan masyarakat desa, jumlah penduduk masyarakat kota tidak menentu dan sering berubah, dikarenakan mobilitas penduduk yang datang dan pergi untuk

sementara waktu atau dalam jangka yang lama. Sikap kekerabatan atau gotong royong di masyarakat kota sangat minim bahkan tidak terwujud. kondisi ini disebabkan masyarakat kota memiliki kesibukan masing-masing yang lebih padat sehingga tidak memiliki waktu luang yang sama untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Masyarakat kota lebih banyak berkerja di sektor jasa dan sektor industri sehingga masyarakat membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun demikian penghasilan masyarakat kota dapat dikatakan stabil karena penghasilan yang tetap untuk setiap bulannya. Masyarakat kota biasanya mampu mengurus dirinya dan keluarganya secara mandiri tanpa harus bergantung pada tetangga atau orang lain.

Kehidupan bermasyarakat, masyarakat kota biasanya dibagi dalam keahlian individu, sehingga pembagian kerja dalam hal ini berbasis pada keahlian individu dan tidak mengenal usia muda atau tua. Masyarakat kota berasal dari berbagai karakteristik individu karena kota sebagai tempat pertemuan masyarakat dalam mencari pekerjaan. Dari kondisi masyarakat kota yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat kota memiliki pekerjaan dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka dapat dikatakan memiliki keberdayaan dalam mengakses berbagai sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan. Sementara masyarakat desa meskipun memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan sumber penghidupan belum mampu mengolah potensi dengan nilai jual tinggi dikarenakan keterbatasan dalam pengelolaannya. Dengan demikian, masyarakat desa layak mendapatkan program pemberdayaan untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka.

Secara operasional bentuk-bentuk problematika sosial dalam kehidupan masyarakat diantaranya; 1) kemiskinan, 2) kesenjangan sosial ekonomi, 3) pengangguran, 4) kesehatan fisik dan mental, 5) literasi, 6) kemrosotan moral, 7) kenakalan remaja, dan 8) toleransi. Sementara problematika masyarakat modern secara spesifik, diantaranya: 1) desintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) kepribadian yang terpecah (*split personality*) 3) rendahnya literasi teknologi dan informasi, 4) pendangkalan akidah dan iman, 5) pola hubungan materialistik sangat erat, 6) menghalalkan segala cara, 7) tingkat stres dan frustrasi, 8) kurang peduli pada harga diri dan masa depannya.

Bab II

Pemberdayaan Masyarakat

A. Pengertian Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan sudah lama didengar dan diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat dimaknai sebagai pemberian sesuatu dan pemanfaatan daya masyarakat untuk merubah kondisi masyarakat tersebut. Pemberdayaan berasal dari kata *empower* yaitu *to give power or authority* yang berarti memberikan kekuasaan dan *to give ability* yang berarti usaha untuk memberikan kemampuan atau pemberdayaan (Priyono, O.S., Pranarka, 1996). Sejalan dengan hal pemberdayaan memiliki arti kekuasaan atau pemberdayaan (Edi Suharto, 2015). Di sisi lain, arti pemberdayaan adalah pemberkuasaan kepada masyarakat yang lemah (Soetomo, 2013). Sementara pemberdayaan juga diartikan sebagai konsep yang saling berkaitan dengan kekuasaan (Anwas, 2019).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2013). Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1996). Menurut Payne pemberdayaan diartikan sebagai *“To help clients gain power of decision and action over their own lives byvreducing the effectof social or personal blocks to excerssingexisting power, by increasing capacity and self-confidence to use power andby transferring power from environment to clients.”* Makna dari pemberdayaan tersebut adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, kondisi ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan (Adi, 2008).

Pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero memandang pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post- strukturalis (Jim Ife, 2008). Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses untuk menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang

berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk memengaruhi kalangan elit, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elite.

Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

Keempat, perspektif post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b)

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka (Laksono & Rohmah, 2019).

Pemberdayaan bagi masyarakat pedesaan memberikan kebebasan kepada masyarakat desa dalam mengelola berbagai potensi alam yang dimiliki. Sebagai contoh masyarakat desa dapat mengelola potensi berupa cokelat kemudian diolah menjadi berbagai aneka olahan makanan cokelat seperti bakpia cokelat, dodol cokelat, minuman cokelat dan lain sebagainya. Ide inovatif biasanya akan muncul setelah mereka mampu mengaplikasikan apa yang sudah diterima dalam proses pemberdayaan. Kemampuan tersebut diperkuat dengan kesadaran bahwa mereka memiliki sumber daya untuk mengolah dan ada potensi yang dapat diolah, sehingga dalam proses pemberdayaan terdapat faktor intenal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri kelompok sasaran, sementara faktor eksternal berasal dari kondisi lingkungan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grassroot*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada (Munawar, 2011). Pemberdayaan masyarakat adalah proses memperoleh dan memberikan daya kekuatan atau kemampuan dan kemandirian kepada warga masyarakat miskin

setempat agar mampu mengenali seluruh potensi diri yang dimiliki, untuk menentukan kebutuhannya dan memilih alternatif pemecahan masalah terbaik yang dihadapinya secara mandiri dan berkelanjutan (Sukhemi & Maisaroh, 2019). Pendapat lain menurut pemberdayaan masyarakat merupakan proses dimana orang dapat mengambil kekuatan untuk bertindak secara efektif untuk mengubah kehidupan dan lingkungan mereka (Waridin et al., 2018). Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Purnamasari & Ma'ruf, 2020).

C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan beragam kondisi kesejahteraan yang berbeda-beda. Hal ini juga menjadikan masyarakat memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam merespon berbagai tantangan kehidupan yang berubah seiring kemajuan teknologi. Bagi masyarakat dengan kondisi yang kurang beruntung atau kelompok lemah, mereka membutuhkan berbagai sentuhan untuk terus mampu bertahan hidup. Kekurang beruntungan mereka meliputi mereka tidak memiliki daya untuk mengakses berbagai sumber daya sebagai sumber kehidupannya. Pengetahuan dan keterampilan masih tergolong rendah karena tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya. Kemampuan berpikir masyarakat masih tergolong sederhana karena kurangnya pendampingan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan.

Kelompok lemah dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu: a) kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas,

lemah secara gender, maupun lemah secara etnis; b) kelompok lemah khusus seperti manula, anak-anak, dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, dan masyarakat terasing; c) kelompok lemah secara personal yaitu mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga (Suharto, 2017).

Gambaran dalam masyarakat yang kurang beruntung atau kelompok lemah seperti sekelompok masyarakat tinggal dalam sebuah desa, desa tersebut memiliki potensi alam yang sangat melimpah misalnya buah pisang dengan kualitas yang bagus. Selama ini masyarakat mengolah pisang tersebut dengan cara sederhana misalnya dibuat pisang rebus, keripik pisang dan pisang goreng. Terdapat sedikit kemampuan yang meningkat yaitu adanya kemampuan membuat keripik pisang, tetapi keripik tersebut hanya dikonsumsi oleh keluarga sendiri dan tidak dijual kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka belum memiliki mental usaha dan rasa percaya diri yang sangat minim. Mereka malu jika hasil olahan keripik pisang tidak disukai masyarakat. Mereka khawatir jika tidak laku dan lain sebagainya. Pemikiran sederhana demikian yang perlu dirubah secara mindset supaya mereka memiliki motivasi dan keinginan untuk membuat produksi dengan baik. Tanpa ada pendampingan dari pemberdaya, kelompok masyarakat akan terus menjadi masyarakat yang tidak peka dengan kemajuan kehidupan yang semakin pesat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang mampu memberikan perubahan terhadap kelompok sasaran sehingga mereka memiliki kemampuan untuk merubah kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan *power* atau kekuatan kepada kelompok atau komunitas sehingga

mereka mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Secara umum tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang dengan ketidakberdayaannya baik karena kondisi internal maupun kondisi eksternal. Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memperkuat pilihan bagi masyarakat yang berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya (Suharto, 2017). Dengan demikian tujuan pemberdayaan masyarakat untuk:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan.

Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan. Kebebasan pendapat merupakan hak setiap warga negara dan sudah tertuang dalam Undang-Undang, namun demikian belum semua individu dapat mengemukakan pendapatnya untuk kepentingannya, hal ini karena mereka merasa lemah dan merasa pendapat mereka tidak akan memberikan pengaruh dalam keputusan public. Melalui pemberdayaan, ide atau pendapat setiap individu dapat tersalurkan dan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan sehingga mampu memberikan perubahan terhadap perubahan kehidupannya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Selam ini pendapat setiap individu seolah-olah digiring oleh kepentingan politik, sehingga meskipun kebebasan berpendapat

sudah diberikan tetapi sebenarnya pendapat tersebut adalah pendapat atas kepentingan politik. Hal demikian harus dihindari jika memang akan memberikan kekuatan kepada masyarakat yang lemah tersebut.

Kondisi kelaparan seharusnya sudah tidak lagi terdengar di zaman seperti ini, namun demikian beberapa masyarakat masih merasakan hal seperti ini karena memang masyarakat belum memiliki daya untuk memenuhi kehidupannya. Beberapa hal yang membuat mereka seperti ini adalah adanya rasa malas yang melekat pada diri individu tersebut. Rasa malas bisa terjadi karena tidak adanya etos kerja yang tinggi dari individu tersebut, bisa juga terjadi karena banyaknya *iming-iming* atau bantuan yang sering diberikan sebagai kepentingan politik semata. Ketergantungan masyarakat dengan bantuan dari pemerintah menjadikan mereka malas untuk mandiri karena mereka merasa tanpa bekerja tetap akan ditanggung oleh pemerintah. Kondisi demikian menjadi beban pemerintah dan masyarakat sekitarnya karena bagi mereka yang sudah tidak sabar dengan kondisi kelaparan tadi dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Kegiatan apapun akan dilakukan demi memenuhi kebutuhan perut yang lapar, tentu saja hal demikian banyak kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadikan mereka bebas dari rasa lapar tidak hanya dengan proses sesaat, tetapi melalui proses panjang dan kekuatan secara intern. Perlu pendampingan kepada mereka sehingga mereka mampu melakukan investasi untuk cadangan kebutuhan ketika mereka dalam kondisi yang tidak terduga. Jika hanya mampu memenuhi kondisi saat ini saja dan belum mampu melakukan investasi, maka mereka masih bisa

berpeluang untuk menjadi lapar kembali.

Bebas dari kebodohan adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa setiap individu mampu membaca peluang kehidupan yang terjadi saat ini dan akan terjadi berikutnya. Kemampuan literasi menjadi penting dimiliki oleh masyarakat untuk mengendalikan perkembangan kehidupan yang semakin pesat. Bebas dari kebodohan tidak hanya bebas dari kehidupan buta huruf dan angka, tetapi mereka tidak mudah tertipu atau tidak mudah percaya dari berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Seorang sarjana maupun magister dikatakan bebas dari kebodohan karena sudah memiliki kemampuan tinggi dalam keilmuannya, tetapi bisa saja individu tersebut belum bebas dari kebodohan jika tidak mampu mengaplikasikan keilmuannya tersebut dalam dunia nyata. Gelar tidak hanya sebagai perpanjangan nama saja, tetapi tidak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Dengan demikian, yang memerlukan pemberdayaan tidak hanya mereka yang lemah secara ekonomi, tetapi mereka yang belum literate menjadi penting untuk diberdayakan, sehingga tujuan pemberdayaan juga berkaitan dengan kemampuan berliterasi dalam berbagai bidang kehidupan.

- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

Sumber produktif dalam masyarakat sudah tersedia dengan sendirinya oleh alam. Sumber produktif akan memberikan manfaat kepada masyarakat apabila diolah dengan baik

oleh masyarakat tersebut. Kemampuan berinovasi menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Jika mereka hanya mengandalkan wujud asli dari alam maka kemampuan mereka dalam bertahan hidup dengan tingkat kesejahteraan masih rendah. Tetapi apabila mereka mampu mendiversifikasi berbagai potensi alam maka mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan berbagai produk yang sudah dibuat. Dalam memanfaatkan potensi alam atau sumber produktif juga harus membaca peluang yang ada saat itu. Mereka harus memiliki kemampuan dalam menyentuh kebutuhan pasar misalnya anak muda lebih senang dengan inovasi produk yang bertajuk milenial, sementara pasar orang tua lebih senang dengan inovasi produk yang tradisional. Selain itu, peluang saat ini adalah banyaknya masyarakat yang lebih menyukai makanan sehat dan alami dan tidak dicampur dengan berbagai zat pewarna karena banyaknya risiko penyakit yang ditimbulkan dari makanan yang kurang sehat. Dengan demikian peluang untuk menginovasi makanan sehat juga perlu diperhatikan mengingat banyak kalangan yang lebih menyukai hidup sehat dengan makan-makanan yang alami. Meskipun demikian bahan makanan tersebut tetap disentuh dengan inovasi dan kreatifitas meskipun tidak harus dicampur dengan bahan-bahan kimia supaya tetap menarik.

Kemajuan teknologi telah menjadikan berbagai produk makanan dapat segera tersampaikan kepada konsumen. Teknologi mampu membuat pemasaran produk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan mereka kemampuan dalam mengolah sumber produktif dan

mengolahnya dengan teknologi serta mampu membaca peluang pasar.

- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

Masyarakat yang berdaya akan memiliki kemampuan dalam menggunakan ide- ide kreatifnya dan memiliki kemampuan dalam menggunakan hal suara atau hak pilihnya. Mereka yang berdaya akan mampu memberikan suara jika memang tidak memberikan keberpihakan terhadap komunitas mereka. Hal suara mereka merupakan hak suara yang asli dari hati Nurani mereka bukan atas kepentingan pihak lain. Mereka juga mampu memilih atau menentukan keputusan berdasarkan pemikiran dengan mempertimbangkan kebermanfaatannya bagi dirinya dan kelompoknya. Dengan demikian mereka telah berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Payne, 1997). Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Dari berbagai tujuan pemberdayaan yang telah diuraikan tersebut, perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan untuk mengetahui kelompok atau komunitas tersebut sudah berdaya atau belum. Sebagai contoh ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap usaha dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga

miskin) yang perlu dioptimalkan (Suharto, 2017). Beberapa indikator dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat Sejahtera, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*).

- d) Kebebasan mobilitas yaitu kemampuan seseorang untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.

Seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, dan ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri. Seseorang mampu pergi ke pasar karena ada kebutuhan yang harus ia penuhi misalnya kebutuhan rumah tangga untuk menyiapkan makanan. Individu tersebut mampu menentukan prioritas bahan makanan yang harus dibeli lebih utama dan mana yang dibeli untuk berikutnya. Kemampun demikian menjadi penting karena untuk menjaga kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan. Kelompok masyarakat atau individu mampu pergi ke fasilitas kesehatan karena mereka memiliki kesadaran dalam bidang kesehatan dan memiliki keuangan untuk berobat. Dalam hal ini masyarakat telah berdaya karena mampu menentukan pilihan untuk pergi ke fasilitas kesehatan daripada hanya membeli obat yang terjual bebas di pasaran. Mereka mampu berpikir untuk mencegah sakit yang lebih parah, tentu saja mereka sudah memiliki tabungan untuk kesehatan. Masyarakat memiliki kemampuan untuk pergi ke tempat ibadah karena dianggap sebagai kebutuhan manusia

untuk menjaga keimanan dalam sang pencipta. Mereka sudah mampu meluangkan waktu untuk melakukan kewajiban, tentu saja waktu bagi mereka tidak hanya untuk mencari uang, tetapi waktu juga dimanfaatkan mereka untuk bersyukur atas nikmat yang sudah diperoleh. Selain untuk menjaga kebutuhan Rohani melalui ibadah, mereka juga membutuhkan kebutuhan secara psikologis. Pergi ke tempat rekreasi atau hiburan juga merupakan aktivitas yang dibutuhkan untuk menstabilkan dinamika kehidupan seseorang. Mereka mampu pergi ke tempat hiburan tentu saja mereka memiliki keuangan yang lebih setelah memenuhi kebutuhan utamanya. Hal ini sebagai pendukung dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

e) Kemampuan membeli komoditas kecil

Kebutuhan tersebut yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, gula, minyak goreng dan bumbu dapur); kebutuhan pribadi (sabun, sampo, bedak, parfum). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

Kebutuhan manusia terdiri atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan pokok atau primer merupakan kebutuhan yang wajib terpenuhi dalam kehidupan seseorang supaya mereka mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya, sehingga tidak bergantung kepada pihak lain. Mereka mampu memutuskan kebutuhan apa yang harus diutamakan dan mampu menentukan jenis serta jumlah barang yang harus dibeli.

f) Kemampuan membeli komoditas besar

Kebutuhan tersebut yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti TV, HP, lemari pakaian, kulkas. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. Selain kebutuhan primer, masyarakat juga mampu untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier. Kebutuhan ini sebagai penunjang dalam mendapatkan informasi supaya mereka mampu mendapatkan informasi secara benar dan tidak mudah mempercayai informasi yang sifatnya *hoax* atau tidak valid.

g) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga

Keterlibatan tersebut yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian hewan ternak, memperoleh kredit usaha. Keterlibatan dalam membuat keputusan dalam keluarga sangat penting dilakukan karena keputusan ini akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga sehingga masing-masing individu memiliki partisipasi dalam musyawarah menentukan keputusan yang tepat.

h) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, yaitu terkait kejujuran dalam anggota keluarga misalnya ketika ditanya apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnnya, apakah ada yang melarang untuk mempunyai anak; atau apakah ada yang melarang untuk bekerja di luar rumah.

- i) Kesadaran hukum dan politik, yaitu mengetahui nama salah satu seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris. Kesadaran hukum juga ditunjukkan dengan partisipasinya dalam menggunakan hal pilih dengan baik dan benar. Mereka mampu menyalurkan hak suaranya sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak lain. Mereka juga mampu menentukan tokoh atau pemimpin yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.
- j) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, seseorang dianggap berdaya jika pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarga, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki point tinggi jika memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya. Individu dalam keluarga mampu memiliki aset yang dapat digunakan untuk investasi di masa yang akan datang. Mereka tidak menggunakan aset tersebut untuk saat ini, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.

Indikator keberhasilan program pemberdayaan dalam bidang ekonomi mencakup (Sumodiningrat, 1999):

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan

oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

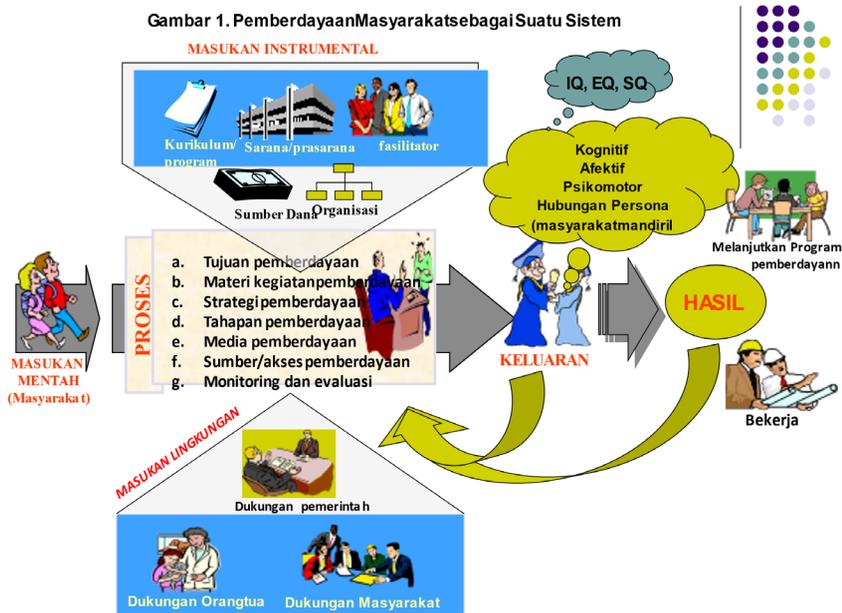
- c) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usage produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- e) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Bab III

Komponen-Komponen Pemberdayaan Masyarakat

A. Pemberdayaan Masyarakat suatu Sistem

Setiap upaya manusia dalam membangun diri dan lingkungannya dipengaruhi banyak komponen yang saling terkait. Keterkaitan masing-masing komponen memiliki interaksi, interelasi, dan interdependensi yang bersifat fungsional untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik. Setiap komponen memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan capaian tujuan yang telah disepakati bersama.



Gambar 3.1. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sistem

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa untuk memberdayakan masyarakat dipengaruhi oleh; 1) kondisi, potensi, kebutuhan dan permasalahan masyarakat (*raw input*), yang akan diberdayakan. 2) instrumen input, segala perangkat pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi; fasilitator, kurikulum/program, tata Kelola, sarana prasarana, sumber dana/keuangan, 3) *environmental input*, lingkungan yang sangat memengaruhi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, yang meliputi; lingkungan keluarga, lingkungan pemerintah dan lingkungan masyarakat. 4) proses pemberdayaan masyarakat, yang meliputi; penentuan tujuan, penyiapan materi, pemilihan strategi, Langkah-langkah operasional, pemanfaatan media, penyediaan sumber belajar,

penyiapan evaluasi yang tepat dan tindak lanjut. 5) *output*, keluaran atau capaian dari kegiatan program pemberdayaan masyarakat jangka pendek yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan 6) *outcomes*, dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan terhadap pengembangan potensi, menuju kemandirian masyarakat.

Program pemberdayaan telah lama digunakan oleh pemerintah untuk mengentaskan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat, namun demikian program-program tersebut terkadang hanya memberikan penguatan jangka pendek dan tidak memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kondisi demikian sangat dipengaruhi banyak faktor, yaitu tidak adanya, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta akses pada informasi. Dengan demikian faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu komponen pemberdayaan masyarakat. Komponen merupakan unsur penting yang harus ada dalam proses pemberdayaan. Komponen yang terpenuhi akan memberikan dukungan dalam proses pemberdayaan masyarakat sehingga hasil pemberdayaan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

B. Komponen Pemberdayaan Masyarakat

Komponen dalam pemberdayaan masyarakat bervariasi tergantung dari kondisi masyarakat dan program yang diberikan. Secara umum, setiap program kegiatan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan memiliki unsur atau komponen (1) *raw input* bahan mentah yang akan di olah sebagai objek sekaligus subjek dalam program kegiatan. Selanjutnya (2) komponen pendukung yang terdiri atas *environmental input dan instrumental input*. *instrumental input* daya dukung fasilitas, sarana prasarana, biaya, tata kelola,

kurikulum dan fasilitator, sedangkan *environmental input* daya lingkungan keluarga, masyarakat dan pemegang kebijakan (*policy maker*), sebagai penyangga keterlaksanaan program dan penerima dampak. 3) Proses, setiap program yang baik selalu diawali dengan perencanaan yang baik, dilakukan secara terprogram, sistematis dan berkelanjutan. Pelaksanaan program kegiatan sangat memperhatikan secara detail dari isi perencanaan program yang meliputi; tujuan, bahan materi, strategi/metode, langkah-langkah, media, sumber informasi, perangkat evaluasi dan tindak lanjut. Setiap proses pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kegiatan pendahuluan (apersepsi, motivasi, dan bina suasana), langkah-langkah (tahapan kegiatan sesuai strategi/metode yang diterapkan), penutup (*review* dan kesimpulan). 4) evaluasi, tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan atau target program yang telah di laksanakan dan merefleksi kelemahan-kelemahannya.

Pada sisi lain, komponen pemberdayaan masyarakat menurut laporan World Bank terdiri atas (Institute., 2005):

a. Akses pada informasi

Akses pada informasi menjadi unsur penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Indikator akses pada informasi bagi masyarakat adalah tersedianya informasi yang transparan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi. Tujuan dari adanya akses informasi bagi masyarakat adalah untuk memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-morma bermasyarakat yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang akan diperoleh oleh masyarakat, masalah-masalah yang akan dihadapi (Yustikasari., 2007).

Dengan adanya akses informasi dan teknologi maka dapat: meningkatkan efisiensi dan mampu berkompetisi dalam ekonomi global, memungkinkan untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan lain seperti kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dan menciptakan sumber-sumber pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat miskin (Institute., 2005).

b. Partisipasi

Partisipasi menjadi unsur penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena keterlibatan masyarakat menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi melalui pemberdayaan tersebut. Partisipasi didefinisikan sebagai partisipasi perempuan setara dalam proses pengambilan keputusan, dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan administrasi. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi berarti keterlibatan dalam penilaian kebutuhan, perumusan proyek, implementasi dan evaluasi. Kesetaraan partisipasi berarti melibatkan perempuan dalam membuat keputusan dimana komunitas mereka akan terpengaruh, dalam proporsi yang sesuai dengan proporsi mereka dalam komunitas yang lebih luas.

Partisipasi masyarakat berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan atau pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat baik laki-laki dan perempuan yaitu adanya kepemilikan peran dari masyarakat dalam pembuatan keputusan (Uphoff., 1997). Partisipasi merupakan pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pariwisata adalah adanya keikutsertaan

perempuan dalam pengambilan keputusan secara adil. Masyarakat adalah bertingkat sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan (Arnstein, 1969).

Partisipasi menjadi empat jenis. Pertama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan (Uphoff., 1997). Partisipasi berkaitan dengan penentuan alternatif dalam gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi menuntut masyarakat untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Adapun wujud dari partisipasi ini adalah kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Partisipasi yang kedua, yaitu partisipasi dalam pelaksanaan suatu program. Adapun wujud dari partisipasi ini adalah menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi yang ketiga yaitu partisipasi dalam pengambilan manfaat. Makna partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Segi kualitas dapat dilihat dari adanya peningkatan output, sedangkan secara kuantitas dapat dilihat besarnya persentase keberhasilan program. Partisipasi yang keempat adalah partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut LAN-RI (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Implementasi program pemberdayaan masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horisontal. Secara vertikal memiliki makna bahwa program-program kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat mendukung/mengikuti secara sah regulasi program-program pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Secara horisontal memiliki makna bahwa implementasi dan hasil program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan oleh anggota masyarakat dan mendukung berkembangnya nilai-nilai dan potensi masyarakat.

d. Kapasitas organisasi lokal

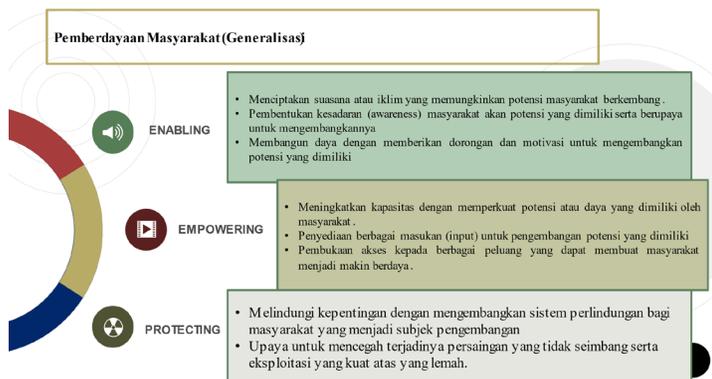
Organisasi lokal dalam suatu masyarakat memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Organisasi lokal memiliki peran yang strategis dalam mendukung program pemberdayaan sebagai wadah untuk mengelola potensi baik sumber daya manusia ataupun potensi alam lainnya. Sebagai contoh dalam desa wisata mereka memiliki kelomok sadar wisata atau pokdarwis sebagai wadah untuk masyarakat melakukan musyawarah dan mengelola potensi wisata. Melalui organisasi maka sumber daya manusia dapat tertata dengan baik dan memungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai mitra dengan mudah karena ada struktur pengelolaan yang jelas. Selain itu untuk memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat karena sudah diatur dalam organisasi tersebut.

Komponen pemberdayaan masyarakat terdiri atas; (1) adanya inklusi dan partisipasi masyarakat; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi; (4) profesionalitas pelaku pemberdaya (Yustikasari., 2007).

Bab IV

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tahapan-tahapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tahapan yang diterapkan dalam pemberdayaan antara program yang satu dengan yang lainnya tidak sama karena sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing program.



Gambar 4.1. Tahap Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tahapan; 1) *enabling*, aktivitas yang dilakukan meliputi; a) menciptakan suasana/ iklim atau atmosfer yang memungkinkan potensi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, b) Menumbuhkan kesadaran (*awareness*) masyarakat akan potensi dan kondisi yang dimiliki untuk dikembangkan, c) memberikan motivasi, persuasi dan stimulasi masyarakat untuk mengelola potensi dan kondisi yang dimiliki. 2) *Empowering*, aktivitas yang dilakukan meliputi; a) meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya/kekuatan yang dimiliki, b) penyediaan berbagai masukan untuk pengembangan potensi yang dimiliki, c) pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan (*networking*). 3) *Protecting*, aktivitas yang dilakukan meliputi; a) melindungi dan mengembangkan perlindungan bagi masyarakat dalam kehidupannya, b) mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat, c) mencegah terjadinya eksploitasi dari kuat ke yang lemah.

Tahapan pemberdayaan adalah:

a. **Penyadaran dan pembentukan perilaku**

Pada tahap ini kelompok sasaran diberikan penyadaran mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar menjadi kondisi yang sejahtera. Penyadaran yang dilakukan memberikan kesempatan kepada sasaran untuk mengungkapkan keinginan dan keadaan sebenarnya tentang kondisi saat ini. Dalam proses penyadaran perlu diberikan motivasi untuk merangsang kesadaran perlunya memperbaiki kondisi saat ini untuk menciptakan kondisi ke depan yang lebih baik. Dengan demikian, sasaran memiliki gambaran yang terjadi di masa depan setelah mereka mendapatkan sentuhan pemberdayaan, tentunya

sesuai dengan kebutuhan sasaran.

b. Transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan

Pada tahap ini dilakukan aktivitas pembelajaran terkait berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan. Pengetahuan dan keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran, sehingga sasaran akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menjadi nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

c. Peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan

Pada tahap ini, sasaran diarahkan untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada tahap sebelumnya mampu menjadikan masyarakat menjadi mandiri dengan mengembangkan keterampilan tersebut. Dengan adanya kemandirian maka masyarakat akan mendapatkan pendapatan yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan.

Tahapan pemberdayaan menurut (Adi, 2008) ada 7 tahapan yaitu:

- a. Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaknai untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator terkait pendekatan yang dipilih. Sementara penyiapan lapangan adalah untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

b. Tahap *assessment*

Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh sasaran. Selain itu untuk menggali potensi alam ataupun potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

c. Tahap perencanaan alternatif

Pada tahap ini, fasilitator melibatkan diri secara aktif dalam kelompok masyarakat calon sasaran untuk berpikir terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta memberikan gambaran solusi dari permasalahan tersebut. Fasilitator tidak hanya memberikan satu solusi dari permasalahan yang dihadapi sasaran tetapi memberikan beberapa alternatif solusi sehingga masyarakat dapat terlibat untuk menentukan sesuai dengan kebutuhannya.

d. Tahap formulasi

Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat kelompok sasaran untuk menformulasikan ide atau gagasan masyarakat terutama dalam bentuk tulisan apabila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana.

e. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, masyarakat mengimplementasikan terkait rumusan program yang telah dirumuskan secara bersama-sama. Dalam proses ini perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dengan fasilitator supaya program yang disepakati dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan.

f. Tahap evaluasi

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan

yang telah dilakukan. Evaluasi akan menghasilkan informasi yang maksimal apabila dilakukan secara bersama-sama antar masyarakat dengan fasilitator.

g. Tahap terminasi

Pada tahap ini yaitu tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Proses terminasi dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri sehingga tidak bergantung pada pihak lain.

Proses pemberdayaan yang pernah ditemukan dari hasil penelitian memberikan langkah yang lebih kompleks karena dimulai dari tahap awal sampai pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat sasaran (S. Sujarwo et al., 2022). Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Tahap identifikasi, tujuan tahap ini adalah untuk mengetahui masalah atau kondisi kelompok sasaran dalam suatu daerah, kebutuhan kelompok sasaran, dan potensi yang ada dalam masyarakat tersebut.
- b. Tahap selanjutnya adalah mendesain program pelatihan dengan menentukan teknik pelaksanaan pelatihan. Kegiatan pelatihan didesain dengan melibatkan mitra dari kelompok masyarakat tersebut.
- c. Tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan pelatihan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Langkah-langkah dalam proses pelatihan meliputi:
 1. Persiapan, pada tahap persiapan ini fasilitator menyiapkan:
 - a) Perangkat pelatihan yang meliputi:
 - (1) Tujuan pelatihan
Tujuan dari pelatihan pada kelompok sasaran adalah memberikan keterampilan kepada sasaran dalam

memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas produk sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.

(2) Materi pelatihan

Materi yang diberikan dalam kegiatan pelatihan meliputi motivasi dan sikap mental dalam mengembangkan pemanfaatan potensi lokal yang ada dalam masyarakat sasaran. Materi selanjutnya menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Semua materi yang disampaikan sebaiknya dalam bentuk teori dan praktik sehingga kelompok sasaran benar-benar dapat memahami apa yang telah disampaikan dalam proses pemberdayaan.

(3) Metode

Metode yang digunakan dalam pelatihan menggunakan metode demonstrasi yaitu peserta memperhatikan pelatih kemudian mengikuti praktik secara langsung.

(4) Media

Media yang digunakan untuk kegiatan pelatihan menyesuaikan dari kebutuhan kelompok sasaran. Secara umum media pelatihan dapat berupa kamera, LCD, laptop, handphone, media lingkungan dan isinya.

(5) Menyiapkan sarana prasarana

Sarana prasarana pelaksanaan pelatihan dalam program pemberdayaan masyarakat meliputi:
(a) lokasi pelatihan, yaitu lokasi yang dapat

- dimanfaatkan untuk kegiatan berbagai program pelatihan; (b) ketersediaan tempat untuk istirahat seperti tempat untuk makan dan melakukan ibadah.
- (6) Menyiapkan alat dan bahan, Alat dan bahan yang digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran.
- (7) Menyiapkan program
Pada tahap menyiapkan program, hal perlu diperhatikan adalah terkait kelompok sasaran. Kelompok sasaran yang mengikuti pelatihan biasanya termasuk dalam kategori orang dewasa, sehingga perlu koordinasi waktu dan tempat pelaksanaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat memiliki kesibukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, rumah tangga dan mengurus pertanian.
- (8) Menyiapkan sumber daya manusia
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menyiapkan sumber daya yaitu menyiapkan narasumber atau pelatih sebagai pemateri dalam pelatihan. Nara sumber harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidangnya sehingga mampu memberikan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya adalah menyiapkan kelompok sasaran yang sudah memiliki keaktifan dalam kegiatan komunitas di masyarakat, baik di bidang seni budaya, ekonomi
-

sosial kemasyarakatan, pendidikan, keagamaan dan sebagainya sesuai dengan kondisi dan potensi di desa. Kelompok sasaran merupakan sumber daya lokal yang dipersiapkan untuk melanjutkan program pemberdayaan sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

(9) Menyiapkan calon mitra

Pada tahap ini hal yang dipersiapkan adalah menyiapkan calon lembaga mitra yang sesuai dengan fokus pelatihan. Selain itu lembaga mitra memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan sampai kelompok sasaran memiliki usaha yang sudah direncanakan.

2. Pelaksanaan

a. Koordinasi

Kegiatan koordinasi dilakukan untuk merumuskan rencana kegiatan melalui diskusi dengan kelompok sasaran. Kelompok sasaran dalam hal ini adalah perempuan desa wisata. Kegiatan diskusi dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema pemanfaatan potensi lokal masyarakat.

b. Sosialisasi

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi awal kepada kelompok sasaran terkait kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan sesuai kesepakatan kelompok sasaran. Sosialisasi dilakukan oleh pengembang program didampingi organisasi dalam masyarakat untuk memperkuat tujuan pelatihan.

c. Membentuk kelompok kecil

Tahapan berikutnya adalah membentuk kelompok kecil dengan tujuan untuk mempermudah dalam penyampaian berbagai materi sehingga produk yang dihasilkan akan lebih maksimal. Memperkuat kemampuan SDM (pengelola dan kelompok sasaran) Penguatan sumber daya manusia diawali dengan pemberian motivasi. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kekompakan dan rasa memiliki bagi perempuan terhadap komunitas yang saat ini dikelola oleh mereka. Motivasi yang kuat dapat menjaga mereka untuk tetap fokus mengelola kelompok. Selanjutnya adalah penguatan materi kepada pengelola dan kelompok sasaran untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan potensi lokal desa.

d. Pelatihan

Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah pelaksanaan pelatihan bagi kelompok sasaran oleh nara sumber yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini materi secara tertulis sebaiknya diberikan kepada peserta untuk bahan belajar setelah kegiatan pelatihan selesai. Pelaksanaan pelatihan bekerja sama dengan lembaga mitra dan CSR untuk memberikan dukungan baik secara materi maupun non materi.

e. Implementasi

Tahap terakhir adalah implementasi terkait produk yang sudah dihasilkan dalam kelompok kecil. Pada tahap ini kelompok sasaran bersama mitra diberikan

kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini produk yang sudah dihasilkan dapat diproduksi dalam skala besar dengan tujuan untuk memberdayakan potensi lokal yang dimiliki.

3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

a. Evaluasi awal kegiatan

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan SDM, perangkat dan seluruh komponen program kegiatan yang akan dilaksanakan. Beberapa komponen awal yang disiapkan adalah: kesiapan kelompok sasaran, kesiapan perangkat program, kesiapan nara sumber atau mitra, dan kesiapan tempat.

b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Evaluasi pada tahap ini adalah partisipasi aktif dari kelompok sasaran ketika kegiatan FGD, sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan dari pengembang program. Penguatan yang diberikan mampu membuat perempuan memiliki antusias terlibat dan termotivasi untuk terus memanfaatkan potensi lokal sebagai ciri khusus potensi desa.

c. Evaluasi akhir kegiatan

Evaluasi pada tahap ini adalah melihat kelayakan panduan yang sudah diterapkan dalam kelompok besar. Tahap terakhir dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah evaluasi. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan setiap satu bulan sekali dan setelah ada kegiatan dalam

kelompok. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk saling menilai kinerja dari masing-masing anggota. Evaluasi yang dilakukan juga bertujuan untuk menentukan jumlah produksi barang atau makanan selanjutnya jika stok barang sudah akan habis.

4. *Pendampingan*

Pendampingan dilakukan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh peserta setelah kegiatan selesai. Selain itu pendampingan bertujuan untuk memberikan arahan dan masukan ketika kelompok sasaran mengalami permasalahan dalam proses produksi sampai. Pendampingan yang maksimal dapat menjadikan produk yang dihasilkan juga lebih baik. Dengan produk yang lebih baik maka akan meningkatkan jumlah penjualan produk, sehingga memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada komunitas. Hal ini menjadikan pendapatan masyarakat dalam komunitas semakin baik bahkan stabil.

5. *Output*

Proses pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok sasaran.

6. *Outcome*

Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dampak dari proses pemberdayaan adalah: (a) masyarakat memiliki kesadaran diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (b) masyarakat memiliki kemampuan untuk menciptakan pekerjaan atau bekerja dengan orang lain; (c) peningkatan pendapatan; (d)

masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, dan
(e) masyarakat memiliki kemandirian.

Bab V

Tantangan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberikan daya, mengembangkan daya dan mengelola d\mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas.

Pemberdayaan merupakan proses belajar masyarakat yang awalnya mereka tidak memiliki kekuatan, melalui belajar mereka memiliki kekuatan yang bisa digunakan untuk merubah dirinya. Oleh karena itu, butuh tindak lanjut yang berupa pendampingan meskipun

mereka sudah mulai merintis usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat dalam kehidupannya. Contoh pemberdayaan yang tidak berkelanjutan adalah proses pemberdayaan perempuan yang terjadi di desa wisata Nglanggeran. Perempuan yang tergabung dalam komunitas griya batik mendapatkan pelatihan sebagai wujud dari program pemberdayaan, akan tetapi setelah pelatihan selesai dalam jangka waktu tertentu mereka tidak mendapatkan pendampingan. Mereka mampu membuat batik sebagai hasil karya komunitas griya batik, tetapi mereka tidak memiliki rasa percaya diri dari batik yang sudah dihasilkan. Hal ini karena mereka masih ragu dengan karyanya apakah sudah layak untuk dipasarkan atau belum. Sikap mental yang dimiliki oleh komunitas tersebut memberikan pengaruh bagi anggota yang lain dalam komunitas tersebut, sehingga diantara mereka memiliki konsep yang sama yaitu tidak berani memasarkan hasil keterampilan meskipun sebenarnya banyak permintaan dari konsumen. Dari contoh kasus tersebut, tindak lanjut menjadi penting sebagai bagian dari proses pemberdayaan supaya apa yang sudah diterima oleh kelompok sasaran benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupannya.

Arah program pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi, yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Di dalam melakukan pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan

masyarakat, memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan seperti ini, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan yang sangat erat yaitu pertama, pihak yang memberdayakan (community worker) dan kedua, pihak yang diberdayakan (masyarakat). Antara kedua pihak harus saling mendukung sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan bukan hanya dijadikan objek, tapi lebih diarahkan sebagai subjek (pelaksana).

Program-program pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat yang lemah dalam hal akses terhadap sumber daya sehingga mereka memiliki akses setelah mendapatkan pemberdayaan. Sasaran dalam pemberdayaan biasanya dalam bentuk komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok dalam masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Namun demikian kegiatan program pemberdayaan lebih sering dilakukan dalam komunitas masyarakat desa. Beberapa hal yang mendasari bahwa antara komunitas masyarakat desa dengan komunitas masyarakat kota berbeda yaitu : (1) jumlah penduduk; (2) luas, kekayaan dan kepadatan penduduk; (3) fungsi-fungsi khusus komunitas terhadap seluruh masyarakat; dan (4) organisasi komunitas yang bersangkutan (Davis, 1960).

Tantangan Pemberdayaan Masyarakat

Tantangan pemberdayaan tersebut meliputi keterbatasan akses ke informasi, terbatasnya inklusi/partisipasi masyarakat, dan rendahnya kapasitas organisasi lokal yang disertai dengan kompleksitas dalam kelembagaannya, Menurut La Ode dkk bahwa tantangan dalam pemberdayaan masyarakat meliputi 1) tingginya mobilitas dan padat aktivitas masyarakat, 2) Sistem birokrasi yang lama dan panjang, 3) pengalaman intervensi terdahulu oleh beberapa institusi yang tidak berkesinambungan, 4) minimnya data dan akses kesehatan secara merata. 5) Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat masih cenderung rendah. Hambatan yang ditemui pada saat program berlangsung, yaitu: 1) kurangnya pengalaman, keterampilan, pengetahuan dan konsep diri kader pemberdaya masyarakat setempat; 2) kurangnya kesadaran masyarakat 3) karakteristik sosial dan budaya (agama, kondisi ekonomi); 4) informasi dan publikasi program dan implementasi pemberdayaan masyarakat dari media massa sangat terbatas; 5) kurangnya dukungan stakeholder (Reskiaddin et al., 2020).

Berbagai program pemberdayaan telah banyak dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat supaya mereka mendapatkan kesejahteraan, tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Program pemberdayaan dapat berasal dari instansi pemerintahan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan juga CSR (*Corporate Social Responsibility*). Beberapa hal yang menjadi problematika dalam proses pemberdayaan adalah:

1) Program pemberdayaan tidak berkelanjutan

Program pemberdayaan memiliki tujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat supaya mereka mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Program-program pemberdayaan yang selama ini diberikan lebih sering dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dianggap mampu menjadikan kelompok sasaran menjadi individu yang terampil dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Program yang telah diberikan tersebut dinilai sudah memenuhi prosedur dan sesuai tujuan program, akan tetapi kenyataan di masyarakat program pemberdayaan tersebut belum menjawab permasalahan masyarakat (Theresia, 2014). Hal demikian terjadi karena program pemberdayaan tersebut tidak berkelanjutan. Ketika program selesai maka selesai juga hubungan antara pemberi program dengan kelompok sasaran. Semestinya program pemberdayaan mampu memberikan perubahan kepada kelompok sasaran sampai mereka menjadi masyarakat yang mandiri. Status kemandirian kelompok sasaran tidak bisa dilihat secara instan ketika program selesai maka mereka mandiri, tetapi membutuhkan proses yang panjang dalam penyesuaian hal baru yang diterima oleh kelompok sasaran. Dalam hal ini proses tindak lanjut menjadi penting karena memantau secara langsung perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok sasaran meskipun perubahan tersebut bervariasi tergantung dari kecepatan kelompok dalam merespon dan berinovasi.

2) Kurangnya perencanaan yang matang

Langkah awal dalam proses pemberdayaan adalah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh calon kelompok

sasaran. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, serta berbagai permasalahan yang dialami, sehingga muncul peluang untuk dilakukan pemberdayaan. Proses identifikasi tersebut melibatkan partisipasi calon kelompok sasaran supaya permasalahan yang muncul benar-benar apa yang dialami oleh kelompok sasaran. Setelah berbagai permasalahan teridentifikasi langkah selanjutnya adalah perencanaan program yang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Namun demikian kondisi di masyarakat yang terjadi, perencanaan yang dilakukan tidak melalui tahap identifikasi sehingga program yang diberikan seolah-olah paksaan dari kepentingan sepihak. Program demikian bisa dikatakan masuk dalam konsep *top-down*, yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif mulai dari identifikasi sampai pada perencanaan. Perencanaan yang tidak matang mengakibatkan proses pemberdayaan tidak berjalan dengan baik. Dalam proses perencanaan hal-hal yang dilakukan adalah adanya penentuan program, penentuan waktu pelaksanaan, penentuan calon mitra, penentuan anggaran, penentuan pelaksanaan (materi, media, metode), penentuan evaluasi, penentuan tindak lanjut program.

Melihat dari banyaknya unsur dalam perencanaan, maka perencanaan program pemberdayaan tidak berlangsung secara cepat tetapi berlangsung lama karena harus menyiapkan dengan matang apa yang seharusnya ada dalam proses pelaksanaan nantinya. Tujuan dari perencanaan program adalah mampu memberikan perubahan setelah program dilaksanakan sesuai apa yang sudah direncanakan. Perubahan terencana dalam

pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu perubahan yang dipaksakan atau bujukan dan perubahan melalui pembelajaran (Mardikanto, 2013). Makna dari perubahan yang pertama yaitu program pemberdayaan lebih memprioritaskan pada hasil, sementara makna pada perubahan melalui pembelajaran adalah mengutamakan sebuah proses. Proses pemberdayaan yang lebih mengutamakan pada perencanaan yang pertama cenderung berjalan lebih singkat sehingga akan menggunakan bujukan supaya program cepat selesai. Proses pemberdayaan yang mengutamakan pada pembelajaran maka akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal meskipun waktu yang dibutuhkan relatif lama karena membutuhkan proses.

3) Strategi pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi dalam pelaksanaannya. Strategi pemberdayaan yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sebagai kelompok sasaran. Hal ini dikarenakan kelompok sasaran merupakan masyarakat dengan karakteristik yang beragam, sehingga pendekatan/strategi/metode harus menyesuaikan kelompok sasaran. Strategi pemberdayaan tidak bisa disamakan untuk semua kondisi kelompok sasaran. Pendekatan/strategi andragogi yang sering dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena pendekatan ini menganggap kelompok sasaran adalah orang sudah memiliki pengalaman dalam hidupnya. Kesalahan yang terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan ini adalah, masyarakat dianggap memiliki pengalaman yang sama.

Sebagai contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat petani. Berdasarkan konteks ini masyarakat dianggap memiliki pengalaman yang sama sehingga materi yang disampaikan sama bagi semua peserta. Padahal kemungkinan kelompok sasaran memiliki pengalaman menjadi petani baru beberapa minggu, karena perpindahan profesi sebelumnya. Tentu saja metode berbasis pengalaman kurang tepat diterapkan karena pengalaman peserta masih sedikit dalam bidang pertanian. Peserta justru ingin belajar dari apa yang disampaikan oleh pemberdaya. Jika pendekatan/strategi ini terus diterapkan maka tidak akan memberikan manfaat yang berarti dari tujuan pemberdayaan. Bisa jadi kelompok sasaran akan kembali lagi pada profesi yang sebelumnya daripada mengubah kondisinya setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Pendekatan andragogi akan bermanfaat diberikan jika digunakan untuk menggali pengalaman sebagai sumber belajar bersama, bahkan peserta pelatihan bisa menjadi sumber belajar karena pengalamannya yang sudah bertahun-tahun menjadi petani. Dengan demikian pembelajaran akan lebih bermakna bagi masing-masing peserta.

4) Materi dalam pemberdayaan

Seringkali dalam proses pemberdayaan tidak melihat komponen peserta pelatihan yang merupakan masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang heterogen memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh materi terkait pelatihan membuat cokelat bagi perempuan desa wisata melalui teori. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh semua peserta karena pemahaman belajar orang dewasa berbeda-beda sehingga materi harus menyesuaikan. Orang dewasa akan mudah memahami

materi apabila mereka sambil melakukan aktivitas terkait materi yang disampaikan. Peserta akan terus teringat dengan pengalaman-pengalaman dalam belajar berbasis praktik atau unjuk kerja. Jika dibrikan materi secara teori mereka cenderung mengantuk dan merasa bosan sehingga tidak termotivasi untuk mengikuti kegiatan sampai akhir. Dengan demikian materi yang disampaikan kepada kelompok sasaran dapat berupa teori dan praktik untuk memperkuat kemampuan dari kelompok sasaran.

5) Pemahaman konsep pemberdayaan masyarakat yang rendah

Masyarakat pedesaan yang menjadi sasaran program pemberdayaan cenderung memiliki konsep pemikiran yang sederhana. Mereka memiliki sikap pasrah dengan keadaan yang dimiliki dan kurang memiliki motivasi untuk berubah ke arah yang lebih maju. Masyarakat yang tinggal di desa pasti dikelilingi dengan potensi alam yang bermanfaat jika masyarakat mampu menyadari dirinya untuk mengolah potensi tersebut. Seperti bait nyanyian yang sudah terkenal sejak zaman dulu “*tongkat kayu dan batu jadi tanaman*”. Makna dari ungkapan tersebut adalah begitu subur tanah di negara ini, sehingga berbagai tanaman dapat tumbuh di tanah Indonesia. Hanya saja pemahaman masyarakat akan potensi tersebut masih rendah. Mereka melihat jauh keberhasilan komunitas lain, padahal mereka memiliki potensi yang sama hanya saja belum mampu untuk menemukan potensi tersebut.

Proses pemberdayaan adalah sebuah proses panjang dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat mulai dari perencanaan sampai tindak lanjut. Jika masyarakat menginginkan perubahan cepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka

pemberdayaan hanya akan bertahan sementara karena hasil yang cepat belum tentu memberikan manfaat yang lama. Hal ini dikarenakan mereka merasa sudah berhasil dalam menjadikan dirinya mandiri, tetapi belum mampu mengelola berbagai tantangan yang muncul setelah program berhasil.

Konsep pemberdayaan yang keliru dalam masyarakat masih sering terjadi yaitu setelah selesai pelatihan mereka selalu mengandalkan modal sebagai pendamping kegiatan usaha. Sebenarnya modal memang menjadi penting sebagai stimulus keberlangsungan program, tetapi kebiasaan masyarakat adalah belum bisa mengubah konsep bahwa modal tersebut tidak harus kembali. Modal yang diberikan biasanya digunakan habis untuk kegiatan usaha, tetapi setelah produknya habis terjual modal tersebut tidak kembali lagi, disinilah terjadi permasalahan bahwa masyarakat belum mampu mengelola modal usaha dengan baik. Untuk produksi selanjutnya mereka mengalami kebingungan sehingga proses pemberdayaan tidak berhasil mengantarkan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Bisa dikatakan bahwa program pemberdayaan mampu memberikan manfaat bagi kelompok sasaran tetapi sifatnya sementara, padahal konsep pemberdayaan adalah adanya manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran sehingga mereka mandiri dan memperoleh kesejahteraan. Tentu saja hal ini membutuhkan pemahaman dari kelompok sasaran bahwa proses pemberdayaan itu tidak instan, tetapi membutuhkan konsistensi dari kelompok sasaran.

6) Pemahaman nilai budaya masyarakat

Masyarakat pedesaan kental dengan nilai-nilai budaya sebagai bentuk warisan budaya yang harus dilestarikan. Kepercayaan

akan nilai budaya membuat kelompok masyarakat enggan untuk merubah kehidupannya supaya lebih maju. Masyarakat merasa apabila ada hal baru yang masuk dianggap sebagai perusak kebudayaan yang selama ini dilakukan bersama masyarakat. Sebagai contoh masyarakat Samin yang berada di Blora adalah kelompok masyarakat yang berpegang teguh pada nilai budaya. Masyarakat memiliki ketua sebagai penentu kebijakan yang dianut oleh kelompoknya. Masyarakat tidak mau mengenal teknologi padahal teknologi ini sangat penting sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat berbasis IT. Selama ini aktivitasnya tidak menggunakan media elektronik. Mereka menggunakan kelompok sebagai penyalur informasi. Dari kondisi tersebut proses pemberdayaan yang dilakukan membutuhkan proses panjang dengan penjelasan terlebih dahulu kepada kepala suku. Masuknya teknologi dalam masyarakat tidak akan mengubah budaya yang selama ini terbentuk dan disepakati bersama. Teknologi informasi yang masuk sebagai penunjang kegiatan belajar masyarakat yaitu diadakannya perpustakaan dengan fasilitas Wifi, sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman.

7) Rendahnya etos kerja masyarakat

Masyarakat di pedesaan terbiasa dengan pola kehidupan yang apa adanya dan banyak prinsip yang dipegang teguh, sehingga terkadang mengubah pola tersebut membutuhkan proses tersendiri bagi pemberdaya masyarakat. Konsep "*kumpul ora kumpul sing penting mangan*" masih menjadi prioritas masyarakat. Makna konsep tersebut adalah yang penting, hidup bersama keluarga, meskipun tidak makan yang penting kumpul dengan keluarga. Hal ini menjadikan motivasi bekerja yang rendah

bagi masyarakat. Keinginan untuk mencapai penghasilan yang tinggi tidak muncul dalam pemikiran mereka, sehingga etos kerja mereka rendah.

Program pemberdayaan yang ditujukan bagi kelompok sasaran dengan etos kerja rendah tentu tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Mereka mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan kondisi yang terbatas sudah merasa bahwa hidup mereka baik-baik saja. Hal ini tentu saja berdampak pada anggota keluarga atau anak-anak mereka yang tidak memiliki motivasi belajar atau sekolah lebih tinggi karena kondisi keuangan keluarga yang tidak mencukupi.

Kondisi masyarakat yang demikian sebenarnya memiliki potensi yang positif, mereka memiliki peluang yang sama dengan masyarakat lainnya untuk mengembangkan potensinya tetapi mereka tidak menyadarinya. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami potensi, hak dan tanggung jawabnya (Muslim, 2009). Sikap sadar akan potensi kebutuhan dapat mendorong dirinya dan masyarakat untuk terus berinovasi, kreatif menemukan ide-ide baru dan melakukan usaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila konsep ini terwujud dalam diri seseorang maka mereka dapat dikatakan sudah berdaya.

Bab VI

Konsep Ekoliterasi

A. Landasan Filosofis Ekologi

Ekologi merupakan ilmu yang mendasari lahirnya ekoliterasi. Ekologi manusia sebagai dasar konsep ekoliterasi menjadi disiplin akademik yang baru muncul pada abad ke-20, namun sudah ada sejak manusia mulai memikirkan hubungan dan tempatnya di alam. Saat ini pemikiran tentang ekologi manusia telah berkembang tidak hanya pada disiplin ilmu akademis namun juga pada disiplin ilmu lainnya (Abdullah, 2017). Sehingga, konsep pengetahuan ekologi dimulai dengan pemahaman tentang ekologi manusia yang muncul pada tingkat perhatian yang berbeda-beda, dari perhatian yang sempit mengenai pengelolaan rumah tangga manusia hingga perhatian yang sangat luas seperti masalah manusia sebagai agen konsumsi yang tidak bertanggung jawab atas bentang alam dan sumber daya yang sangat luas menyebabkan bencana lingkungan akibat ulah manusia yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia sebelum masa industrialisasi.

Selain itu konsep ekologi manusia juga berkaitan erat dengan semua kajian populasi manusia serta ciri sifatnya. Hal ini yang kemudian memberikan pemahaman bahwa ekologi manusia berbeda dengan ekologi umum. Selanjutnya interaksi manusia diartikan sebagai hubungan dengan habitat yang hampir sepenuhnya dibentuk oleh tiap-tiap kebudayaan masing-masing. Kebudayaan telah menjadi bagian terpenting manusia dalam kehidupannya di alam. Dengan demikian, ekologi manusia mengintegrasikan kedua aspek dalam kajian adaptasi ekokultural. Inilah yang menyebabkan ekologi manusia menjadi disiplin akademik yang mengkaji interaksi manusia dan lingkungan alamnya dengan kebudayaan sebagai perantaranya.

Ekologi manusia sangatlah berkaitan erat dengan kehidupan manusia dengan aspek aspek kehidupannya. Seperti ekonomi, hubungan sosial, kekuasaan dan politik hingga nilai dan tatanan norma di lingkungan masyarakat. Sebagaimana hal tersebut membentuk dan dibentuk oleh lingkungannya dalam hubungan timbal balik yang dialektis. Agar lebih dapat memahami hubungan ini, sosial budaya ekologi manusia tidak hanya mengarah pada tatanan sosial budaya tetapi juga aspek-aspek ekologis sebagai satu kesatuan yang holistik dengan kehidupan sosial budaya (A. Terry Rambo dan Percy E. Sajise, 1984).

Di sisi lain, ekologi manusia diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi antar manusia, biologi, kebudayaan dan lingkungan fisik tempat kebudayaan tersebut berkembang. Konsep perubahan dan adaptasi lingkungan hidup menjadi hal yang mendasari dari konsep ekologi manusia. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup senantiasa berubah secara dinamis, perubahannya pun tergantung ruang, waktu, dan tempat. Perubahan

tersebut yang kemudian berdampak pada aktivitas setiap organisme dalam beradaptasi. Proses adaptasi tersebut menunjukkan bahwa manusia memerlukan mekanisme biologis sekaligus kultural (Sutton, M. Q., & Anderson, 2013)

Hal penting lainnya yaitu lingkungan fisik yang berfungsi sebagai kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan. Semua unsur alam dan konstelasi unsur-unsur tersebut saling terhubung melalui jaringan energi yang menginformasikan segala aktivitas manusia. Tidak lepas dari hal itu, sistem sosial menjadi satu konsep yang utama dalam ekologi manusia (Marten, 2001). Sistem sosial yang tersusun atas aktivitas-aktivitas manusia yang terbentuk dan terwariskan baik melalui pranata sosial maupun nilai budaya. Di satu sisi, manusia berada dalam interaksi timbal balik dengan alam sebagai upaya untuk terus bisa mendapatkan penghidupan. Selanjutnya melalui sosiokultural, manusia melakukan interaksi dengan manusia lain. Hubungan tersebut akan berdampak pula pada lingkungan karena interaksi yang dinamis antara manusia dan segala yang ada dalam ekosistem tersebut. Hubungan manusia dengan alam dianalisis oleh adanya pandangan manusia terhadap alam. Sikap manusia tentu didasarkan pada cara pandang mereka terhadap lingkungan. Paradigm tersebut menjadi patokan untuk menafsirkan informasi dan energi yang diterima, kemudian menjadi landasan rumusan tindakan yang akan dilakukannya terhadap lingkungan. Pandangan tersebut yang mengiringi manusia atau memengaruhi tindakan manusia, apakah akan merawat atau merusak lingkungannya.

B. Sejarah Perkembangan Ekologi

Ekologi berasal dari kata Yunani, *oekos* yang berarti rumah dan *logia* atau *logos* yang berarti ilmu. Jadi, secara harafiah ekologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang makhluk hidup yang ada di rumahnya atau dapat juga dipahami sebagai ilmu tentang makhluk hidup yang ada di rumahnya. Dari pengertian tersebut menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari dinamika dan karakteristik kehidupan pada banyak spesies, populasi, komunitas, dan ekosistem alam, termasuk ekosistem buatan.

Kemudian, pada awal tahun 1920-an, para ahli mulai memusatkan perhatiannya pada hubungan fungsional antar organisme yang terbentuk melalui hubungan nutrisi. Konsep rantai makanan mulai terbentuk. Namun, tidak butuh waktu lama bagi para ilmuwan untuk menemukan bahwa rantai makanan ini bukanlah bagian dari rantai linier melainkan rantai siklus, karena ketika organisme yang berpartisipasi dalam rantai makanan tersebut mati dan mangsanya mati, makanan organisme tersebut akan diubah. ke dalam makanan. sepeda. Belakangan diketahui bahwa siklus makanan memang saling berkaitan. Terakhir, pada tahun 1940-an, fenomena siklus pangan yang saling berhubungan dapat dirumuskan dalam dua konsep baru, yaitu ekologi komunitas dan jaringan. Akibatnya, konsep siklus pangan berkembang menjadi jaring makanan atau jaringan aktivitas pangan yang saling berhubungan (McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrie, 2013).

Konsep jaringan ini menjadi semakin populer di bidang ekologi. Model jaringan mulai diterapkan pada setiap tingkat sistem, organisme adalah jaringan sistem organ, organ adalah jaringan sistem saraf, dan seterusnya. Terlihat bahwa pilar atau tujuan utama

ekologi terletak pada bagaimana berbagai komponen kehidupan saling berhubungan dan membentuk jaringan sistem kehidupan. Memahami berbagai jaringan kerja di tingkat organisasi dapat membantu memahami kehidupan ekosistem.

Selama beberapa dekade, perspektif jaringan ini sangat penting bagi ekosistem. Sampai-sampai ekologi diakui sebagai ilmu pengetahuan dan terus berkembang pesat. Apalagi ketika dunia sangat peka terhadap permasalahan lingkungan hidup dalam menciptakan dan menjaga kualitas manusia. Ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mendasarinya dan selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.

Ekologi telah berkembang menuju studi tentang struktur dan fungsi alam atau menuju studi tentang hubungan antara organisme hidup dan semua faktor fisik dan biologis yang membentuk lingkungan. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme hidup atau kelompok organisme dengan lingkungannya (Arjana, 2013). Dalam ekologi, kita mempelajari bagaimana organisme hidup dapat berinteraksi sedemikian rupa sehingga jaringan sistem kehidupan terbentuk pada berbagai tingkat organisasi.

Penelitian ekologi juga dapat dilakukan pada tingkat individu, keluarga, rumah tangga, komunitas, desa, kabupaten, provinsi, nasional, kontinental, dan global. Pada masing-masingnya kita menemukan kesamaan, yaitu cara memahami bagaimana “rumah tangga” manusia dibangun dan dapat berkembang di lingkungannya. Beberapa penelitian berfokus pada bagaimana individu, keluarga, komunitas, dan konsumen menjaga kelangsungan hidup dan keberlanjutan hidup. Seperti penelitian mengenai gizi dan kecukupan

gizi, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta perlindungan masyarakat konsumen. Namun ada juga yang fokus pada bagaimana masyarakat lokal, baik pedesaan maupun perkotaan, dapat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi untuk menjamin kelangsungan hidup dan keberlanjutan hidup mereka.

C. Prinsip Ekologi

Definisi ekologi pertama kali oleh seorang ahli biologi Jerman bernama Ernest Haeckel yang menekankan pada keterkaitan antara seluruh komponen kehidupan dalam satu sistem tunggal. Ekologi mencakup pola, tatanan, dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang dalam perkembangannya dapat digunakan untuk menghasilkan ide-ide mendasar yang penting untuk memahami kompleksitas dan makna kehidupan (Soerjani, 2012).

Di sisi lain, ekologi manusia dibangun atas dasar ontologis yang tidak memisahkan manusia dengan lingkungannya (Abdullah, 2017). Manusia merupakan bagian dari alam yang keberadaannya hanya dapat dicapai melalui interaksi metabolik dengan alam. Kita dapat membedakan interaksi metabolisme manusia dengan spesies lain di alam. Berbeda dengan spesies lain, untuk mempertahankan eksistensinya di bumi, manusia tidak hanya mengambil apa yang dibutuhkannya dari alam, tetapi juga memodifikasi alam untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, alam tidak hanya diserap melalui panca indera, namun juga dikonsepsi dan dipahami melalui kerangka simbolik yang tercipta bersama dalam masyarakat. Dengan kata lain, interaksi antara manusia dan alam dimediasi oleh budaya dan masyarakat, sesuatu yang tidak dimediasi oleh spesies lain.

Falsafah atau prinsip prinsip dasar yang terkandung di dalam teori dan konsep konsep ekologi selain menjadi pijakan bagi formulasi paradig dan etika ekologi, juga dikembangkan sebagai perspektif ekologi. Adapun empat prinsip yang banyak digunakan sebagai perspektif kalangan intelektual dan ilmuwan (Jim Ife, 2008) yaitu sebagai berikut:

No	Prinsip ekologi	Konsekuensi
1	Holistik	<ul style="list-style-type: none"> - Filosofi ekosentrik - Respek pada kehidupan dan alam - Menolak solusi linear - Perubahan yang bersifat organik
2	Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi - Mengurangi konsumsi - Ekonomi tanpa menekankan pada pertumbuhan - Kendala pada pengembangan teknologi - Anti kapitalis
3	Keanekaragaman	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai perbedaan - Tidak ada jawaban tunggal atas suatu masalah - Desentralisasi - Jejaring dan komunikasi lateral - Teknologi tepat guna
4	Keseimbangan	<ul style="list-style-type: none"> - Global/ lokal - Gender - Hak/ tanggung jawab - Perdamaian dan kerjasama

Selanjutnya capra dalam artikel nya tentang *ecology and community* memperkenalkan pula empat prinsip ekologi yang merupakan kunci fenomena kehidupan ekosistem yang dapat ditransformasikan untuk kehidupan organisasi masyarakat modern. Prinsip prinsip tersebut yaitu:

No	Prinsip ekologi	Makna
1	Kesalingtergantungan	- Saling terkait antar anggota komunitas ekologi - Pemikiran sistem
2	Jaring kerja	- Jaring kerja antara anggota yang membentuk pola pola tertentu - Nonlinear, sifat siklis proses ekologi
3	Kerja sama	- Kemitraan - Pelestarian
4	Fleksibilitas	- Kemampuan adaptasi terhadap kondisi yang berubah - Keseimbangan dinamis (stabilitas vs perubahan, keteraturan vs kebebasan)
5	Keanekaragaman	- Keberagaman hubungan, semakin beragam semakin tinggi kemampuan pulih dari gangguan - Multi dimensi untuk solusi

Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip tersebut dikembangkan kembali oleh Capra menjadi enam prinsip, yaitu jaringan, sistem bersarang, siklus, aliran, komposisi, dan keseimbangan dinamis (Capra, 2011). Prinsip pertama menjelaskan bahwa interaksi masing-masing komponen alam terjadi dalam hubungan yang membentuk suatu jaringan, dimana setiap komponen alam terjadi dalam hubungan yang membentuk jaringan satu sama lain. Bahan merupakan inti. Jadi ketika salah satu komponennya hilang atau terganggu, maka menyebabkan gangguan secara keseluruhan. Kedua, alam membentuk sekumpulan sistem yang mengelilingi satu sama lain (*nested system*). Jaringan yang tercipta dalam suatu sistem alami merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar dimana setiap komponennya merupakan jaringan lain yang terpisah. Dengan kata lain, sistem alam merupakan jaringan dari jaringan lainnya.

Ketiga, setiap unsur alam selalu menjadi sumber bagi unsur lainnya, dimana setiap proses alam bersifat siklus sehingga semuanya dapat dimanfaatkan. Keempat, prosesnya selalu berbentuk aliran yang berkesinambungan. Unsur energi dan materi di alam tidak pernah hilang atau “menetap” di suatu tempat melainkan selalu mengalir dari satu unsur ke unsur lainnya. Kelima, asas pembangunan menjelaskan bahwa seluruh komponen alam terutama organisme selalu mengalami perubahan. Prinsip ini erat kaitannya dengan sifat *autogenous* (berkelanjutan) dari sistem kehidupan yang sederhananya, sistem ini selalu menyerap “informasi” dari apa yang ada di dalamnya, dia sendiri telah melakukannya. Seperti halnya sel, ekosistem terus berkembang, karena pada dasarnya setiap sistem kehidupan “belajar” dari “pengalaman”. Terakhir, prinsip dinamis menunjukkan bahwa terdapat hubungan dalam ekosistem yang tidak statis dan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya, setiap perubahan akan terus menerus membentuk keseimbangan tersendiri.

Kedua prinsip ekologi ini dapat dianggap berbeda satu sama lain karena keduanya membentuk perspektif berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, seni, sastra, dan pemberdayaan masyarakat (Soeryo, 2007). Prinsip-prinsip ekologi sebenarnya menjadi sumber inspirasi bagi para intelektual dan akademisi dalam mengembangkan gagasan, pemahaman, dan cara pandang yang berbasis pada ekologi, seperti:

1. Membangun proposisi dan mengembangkan teori ekonomi.
2. Landasan cara pandang seperti *eco-financialism*, *eco-monarchy*, *eco-socialism*, *eco-philosophy* dan paradigma ekologi baru.

3. Nilai dan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan manusia berbasis ekologi dan keadilan sosial.
4. Konsep pembangunan berkelanjutan telah diterapkan sejak tahun 1980an.
5. Landasan modernisasi ekologi dalam hubungan manusia-lingkungan.
6. Perspektif membangun pluralisme, demokrasi dan masyarakat sipil.
7. Ideologi, wadah, dan landasan perjuangan partai.
8. Prospek pengembangan teknologi ramah lingkungan di bidang pertanian, pertambangan dan industri.

Ekosistem tentunya mempunyai banyak perbedaan dengan sistem manusia, sehingga prinsip ekologi belum tentu berlaku langsung dalam kehidupan manusia. Namun ekosistem memiliki aspek yang harus banyak diadaptasi oleh manusia, yaitu keberlanjutan. Bumi telah ada selama milyaran tahun dengan 6 prinsip ini dan manusia harus mengintegrasikan 6 prinsip ini dari tingkat kehidupan sehari-hari hingga tingkat struktur peradaban. Penggunaan kecerdasan ekologis tersebut, manusia harus memposisikan dirinya sebagai bagian dari alam dan terhubung dengan ekosistem yang ada, sekaligus berperan dalam membawa perubahan pada sistem tersebut (Goleman, 2010). Kecerdasan ini nantinya berfungsi untuk meningkatkan kepekaan untuk berpikir luas tentang akibat yang belum terlihat atau langsung dirasakan serta apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya sehingga berujung pada perubahan perilaku. Mengubah perilaku agar sesuai dengan alam hanya bisa dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh relativitas persepsi dan kemampuan alami manusia untuk belajar berdasarkan pengalamannya. Dengan kata lain, unsur

pendidikan, pelatihan, atau pembelajaran khusus diperlukan untuk “menyesuaikan” manusia agar hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi tersebut.

D. Konsep Ekoliterasi

Setiap kehidupan selalu berdampingan dengan lingkungan, sehingga diperlukan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mengelola lingkungan. Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap lingkungan sering disebut dengan Ecoliterasi. Secara pemahaman istilah, *Ecoliteracy* merupakan perpaduan dua kata yaitu *ecological* dan *literacy*, atau dikenal juga dengan sebutan melek ekologi, melek lingkungan, literasi ekologis dan literasi lingkungan. *Ecological* mengarah pada kata sifat yang berarti segala hal yang terkait dengan prinsip-prinsip ekologis atau prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Istilah *literacy* merupakan kata benda yang berarti melek huruf, istilah melek huruf dimaknai dengan keadaan seseorang yang telah mengetahui dan memahami tentang suatu objek di lingkungan sekitar.

Ekoliterasi diartikan suatu kondisi seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap bekerjanya prinsip-prinsip ekologis dalam kehidupan masyarakat atau kondisi seseorang yang sudah mencapai tingkat kesadaran tinggi mengenai pentingnya lingkungan hidup. Hal ini didasarkan dari pendapat Capra dan Keraf bahwa ekoliterasi merupakan suatu keadaan yang melekat pada diri seseorang telah memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekologis dan menjalani hidup berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ekologi mengelola dan mengorganisir lingkungan kehidupan di muka bumi serta mewujudkan masyarakat berkelanjutan (Capra, 2011). Selain pemahaman mengenai lingkungan, ekoliterasi juga diartikan

sebagai kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan tempat tinggal (Goleman, 2010).

Makna ekoliterasi di atas sudah memperlihatkan pentingnya ekoliterasi diberikan pada anak sedini mungkin. Oleh karena itu perlu ada wadah sebagai penyampai pemahaman ekoliterasi, yang bisa dilakukan melalui proses pendidikan. Melalui pendidikan yang diintegrasikan melalui pembelajaran, siswa dikenalkan dengan ekoliterasi dengan harapan nantinya bisa membentuk masyarakat yang sadar akan pentingnya merawat dan mengelola lingkungan sekitar siswa serta membangun masyarakat berkelanjutan. Bahwa ekoliterasi diperlukan dalam pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai keterkaitan dan ketergantungan antara proses alam dengan cara hidup manusia. Pemahaman ekologi harus diprioritaskan di dalam pendidikan transdisiplin ilmu dengan memberi kesempatan siswa untuk berpikir lebih luas. Ekoliterasi juga menjadi kemampuan yang cukup penting saat ini, karena kondisi lingkungan alam yang semakin rusak, efek pemanasan global yang semakin terasa dan bencana-bencana alam yang semakin banyak terjadi. Kondisi tersebut didasarkan pada pendapat Goleman bahwa ekoliterasi menjadi kemampuan cukup penting untuk diterapkan dalam abad 21 (Goleman, 2010). Ekoliterasi membekali siswa dengan pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk mengatasi masalah atau isu lingkungan yang kompleks dengan melihat dari berbagai aspek dan memungkinkan siswa membantu membentuk masyarakat berkelanjutan yang tidak merusak ekosistem tempat tinggalnya.

Ekoliterasi melibatkan proses panjang tidak hanya menggunakan kecerdasan ekologis semata, namun juga mengintegrasikan kecerdasan

emosional dan sosial di dalamnya. Peran kecerdasan emosional dan sosial terjadi ketika menumbuhkan rasa empati yang menjadi dasar siswa memahami keberadaan orang lain, keberadaan makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan, keberadaan ekosistem yang menjadi tempat tinggalnya. Goleman menyebutkan lima kunci untuk membuat siswa memiliki ekoliterasi yaitu mengembangkan empati untuk semua bentuk kehidupan, mempraktikkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kehidupan di masyarakat, memperlihatkan hal yang tidak terlihat untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan dan memahami bagaimana peran alam menopang kehidupan manusia (Goleman, 2010).

Sejarah ekoliterasi diawali dengan literasi lingkungan, *ecological literacy* lalu dikembangkan menjadi *ecoliteracy*. Literasi lingkungan digunakan pertama kali pada tahun 1968 dan dikenalkan oleh Roth dengan sebuah pertanyaan mengenai cara yang harus dilakukan untuk membuat masyarakat melek akan lingkungan (McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrie, 2013). Literasi lingkungan terdiri atas kesadaran dan kepedulian mengenai lingkungan dan masalah-masalah yang terkait di dalamnya, termasuk pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk bekerja bersama menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan serta melakukan kegiatan pencegahan berbagai kerusakan lingkungan. Pengertian di atas juga menggambarkan tujuan literasi lingkungan adalah membuat warga dunia memiliki kesadaran dan kepedulian akan lingkungan, termasuk isu-isu dan masalah lingkungan di dalamnya.

Ekoliterasi tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai ekoliterasi, namun juga sampai pada tahap memiliki sikap dan perilaku peduli lingkungan. Kondisi ini dikuatkan

dalam deklarasi UNESCO dan Hungerford et al. bahwa tujuan ekoliterasi adalah kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan dan tindakan dalam mengelola lingkungan sekitar (McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrie, 2013). Masing-masing dijelaskan sebagai berikut: 1) kesadaran berisi tentang kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan dengan masalah-masalah terkait. 2) Pengetahuan dimaksudkan sebagai pemahaman dasar dan pengalaman mengenai lingkungan dan masalah-masalah yang terkait dengan lingkungannya. 3) Sikap terdiri atas seperangkat nilai, norma dan rasa peduli terhadap lingkungannya. Keterampilan terdiri atas kemampuan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi dan memecahkan masalah terkait dengan lingkungannya. 4) Tindakan sebagai keterlibatan aktif pada semua jenjang menuju resolusi masalah lingkungan. Ekoliterasi memiliki makna yang komprehensif, mulai kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku dalam merawat dan memanfaatkan lingkungan sebagai aset kehidupan.

Bab VII

Program Pemberdayaan Berbasis Ekoliterasi

Pemberdayaan merupakan konsep yang paling sering digunakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang menekankan pada kemandirian komunitas. *Community empowerment is an effort to improve the dignity of the layers of society who are now unable to escape the poverty trap and underdevelopment* (Theresia, 2014). Selain itu, pemberdayaan adalah proses pelibatan masyarakat atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kelompok, bukan masyarakat yang berdaya. Di dukung oleh pernyataan bahwa *empowerment also emphasizes the process, not solely the output of the process* (Anwas, 2013). Pemberdayaan bisa dilakukan melalui pendidikan. Dengan adanya lembaga pendidikan, akses masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Munculnya permasalahan lingkungan yang tiada henti menjadi bukti kurangnya kesadaran lingkungan di masyarakat. Kesadaran inilah yang disebut Fritjof Capra sebagai pengetahuan ekologi.

Menurut Capra, literasi ekologi sebagaimana adalah bagian pendidikan yang menanamkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekologi yang mengarah pada perilaku berdasarkan prinsip-prinsip tersebut (Capra, 2011). Pengetahuan ekologi berarti memiliki kesadaran yang sistemik, memahami keterkaitan kehidupan, mengetahui keadaan dunia dan sekitarnya, serta mengetahui seberapa cepat perubahan yang terjadi. Dengan kata lain, pengetahuan ekologi dapat disamakan dengan kecerdasan ekologis.

Pendidikan untuk kehidupan berkelanjutan (PuKB) berbasis tanaman pangan lokal dapat memberikan peranan yang strategis dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk melestarikan dan keberlanjutan kehidupan. Ecoliteracy atau sering juga disebut dengan kecerdasan ekologi. Kecerdasan ekologi adalah kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap ekologis tempat kita berada. (Goleman, 2010). *The community and its environmental and social health are necessary building blocks in an interdependent globalized world* (Locke, Steven & Russo, Ricardo & Montoya, 2013). Ekoliterasi berupaya memperkenalkan dan memperbaharui pemahaman seseorang akan pentingnya kesadaran ekologis global, guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kesanggupan bumi untuk menopangnya (Sapanca, 2015). *The terms Education for Sustainability (EfS) or Education for Sustainable Development (ESD) are the preferred ones, reflecting the shift towards a social-ecological perspective of human-nature interactions* (Smith, 2007).

Hal tersebut diperkuat menurut pendapat Capra menjelaskan ekoliterasi atau melek lingkungan merupakan kemampuan atas kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup dengan segala isinya yang memang harus dimanfaatkan secara bijak (Capra,

2011). Kekuatan pengetahuan inilah sebagai senjata yang harus dibangun salah satunya mengajak masyarakat untuk bisa membuka pola pikir (*open mindset*) dan mengaktualisasikan peran preventif dalam mengurangi masalah degradasi lingkungan. Akibat permasalahan lingkunganlah yang menjadi input untuk menemukan cara cerdas keluar dalam lingkaran setan bencana ekologi.

Lima poin dari Goleman untuk mengembangkan sikap ecoliteracy yaitu sebagai berikut: a) *Develop Empathy For All Forms of Life* Pembelajaran harus memfokuskan kearah kesadaran, sikap merasakan (empati) akan lingkungan b) *Embrace Sustainability as A Community Practice* Pembelajaran dalam kelompok perlu dilakukan, agar dapat bertanya jawab dengan teman kelompoknya. c) *Make the invisible visible* Pembelajaran nyata sangat diperlukan, hal ini akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna. d) *Anticipate Unintended Consequences* Tahap ini akan mengajarkan untuk bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya e) *Understand How Nature Sustains Life*. Kegiatan ini akan membawa ke dalam tahap evaluasi secara langsung (Rusmana, 2017).

Literasi ekologi berfokus pada pendidikan di mana seluruh aspek pembelajaran didasarkan pada alam, hingga mengalami sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari prinsip-prinsip yang bekerja di alam. Pengetahuan ekologis diperlukan karena untuk mencapai tahap tindakan, masyarakat harus benar-benar mempersepsi dan merasakan, bukan sekadar mengetahui. Jika kita memandang alam sebagai sebuah teks, maka literasi ekologi sebagai definisi dasar literasi merepresentasikan bagaimana alam sebagai sebuah teks berinteraksi dengan manusia sebagai subjek yang sadar. Sebagaimana dijelaskan Garder tentang empat aspek psikologis yang menarik perhatian

manusia, alam sebagai sebuah teks tidak memiliki unsur kesengajaan sehingga teks akan tampil sebagai entitas yang netral. Selain itu, alam juga tidak memiliki sistem nilai yang menyeluruh (tidak bermoral) sehingga tidak memerlukan bias atau penjelasan.

Kedua aspek ini menjadikan alam sebagai teks yang konkrit dan nyata, bukannya abstrak dan terkodifikasi. Teks yang netral sebagaimana adanya harus diterima secara utuh karena segala bentuk proses penafsiran, mulai dari analisis kritis hingga prasangka, justru akan mengurangi kesatuan makna teks itu sendiri, karena proses dasar penafsiran adalah menata sesuatu. Komunitas pra-melek huruf, yang terbiasa dengan interaksi yang lebih holistik, sangat cocok dengan hal ini, karena memberi mereka pemahaman yang lebih dalam mengenai lingkungan dibandingkan komunitas melek huruf. Selain itu, komunitas lisan terbiasa berpikir lebih spesifik dan implisit sehingga secara alamiah lebih hadir, terintegrasi dengan pokok bahasan, bahkan mengintegrasikan narasi sebagai metode transfer pengetahuan. Cerita-cerita klasik masyarakat lisan selalu menganggap alam sebagai unsur yang sangat diperlukan dalam cerita. Apa yang sudah ada di alam secara otomatis akan “dibaca” tanpa perlu proses pembacaan tersendiri.

Keunikan dari alam sebagai sebuah teks adalah makna yang dihadapkannya bukanlah representasi langsung dari masa kini. Ini bukanlah sesuatu yang ada secara terpisah pada waktu tertentu. Apa yang terlihat di alam saat ini akan menjadi sangat penting di masa depan. Inilah yang dikatakan Garder, bahwa alam tidak bersifat langsung dan instan, dan untuk memahaminya diperlukan kemampuan untuk selalu melihat ke masa depan secara perlahan. Padahal, komunitas lisan tidak memiliki hal tersebut, karena seperti

yang dikatakan orang, komunitas lisan tidak memiliki kemampuan berpikir abstrak sehingga selalu benar-benar memikirkan apa yang sedang terjadi. Namun, kemampuan hidup selaras dengan prinsip ekologi, ditambah dengan asupan informasi yang komprehensif, membuat masyarakat lisan tidak memerlukan kemampuan memikirkan masa depan untuk mampu mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan.

Konsep keberlanjutan adalah konsep yang ada secara alami dan otentik di alam. Ketika komunitas lisan dapat menjalani kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang konsisten dengan alam, maka keberlanjutan tidak perlu didefinisikan sebagai konsep tersendiri. Keberlanjutan menjadi topik yang hanya mendapat perhatian khusus karena komunitas intelektual telah menjauhkan diri dari alam, menjauhi hakikat alam itu sendiri, menjadikan keberlanjutan sebagai topik yang perlu mendapat perhatian. Keberlanjutan menjadi teks tersendiri yang harus dibaca oleh komunitas intelektual, karena menjadi pengetahuan alami masyarakat lisan.

Bab VIII

Pendekatan Pemberdayaan Berbasis Ekoliterasi

Restorasi ekologi muncul sebagai pendekatan baru untuk mempelajari ekologi manusia di tengah kekhawatiran mengenai dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem (Egan, D., Hjerpe, E. E., & Abrams, 2011). Upaya manusia dalam memanfaatkan sumber daya dan energi dari alam merupakan suatu proses transformasi dari alam itu sendiri. Dibandingkan dengan masyarakat industri saat ini, ketahanan lingkungan terhadap eksploitasi melebihi kemampuannya untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, hal inilah yang menyebabkan banyak bagian alam rusak secara ekologis. Artinya alam tidak dapat menyimpan dan mendistribusikan kembali energi dan energi yang tersimpan seiring berjalannya waktu. Pendekatan ini pada akhirnya konsisten dengan

upaya pemulihan akamm yang rusak akibat aktivitas manusia dengan mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial. Ilmu pengetahuan dan humaniora kembali muncul untuk menunjukkan perannya dalam memandu kegiatan restorasi lingkungan dan keragaman kepentingan dalam kehidupan sosial. Restorasi di sini dipahami sebagai bentuk membenaran dalam konteks persaingan sosial dan pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup.

Pendekatan ini mulai berkembang dan mendapat pengakuan pada tahun 1990-an dengan fokus pada lingkungan hidup masyarakat dan mengacu pada gaya hidup masyarakat adat setempat. Standar hidup yang mandiri menuntut mereka untuk hidup sesuai dengan kemampuan lingkungan dalam memperbaharui diri, sehingga masyarakat adat memberikan perhatian yang besar terhadap pemulihan lingkungan hidup mereka. Restorasi ekologi ini pada akhirnya bertujuan untuk memulihkan lanskap alam yang diubah secara budaya. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar kegiatan restorasi menyeimbangkan kepentingan masyarakat dengan kepentingan alam. Keberhasilan proyek restorasi akan diukur dari pemulihan keseimbangan ekologi tanpa merugikan gaya hidup atau alam masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan restorasi ekologi bersifat holistik dan menekankan aspek kerjasama manusia melalui restorasi ekologi komunitas, pemulihan ekonomi, pendidikan lingkungan hidup, dan praktik budaya ekologi, kebijakan, tata kelola dan perencanaan (Egan, D., Hjerpe, E. E., & Abrams, 2011).

Menurut Sujarwo, pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan pada pemberdayaan masyarakat yang berbasis ekoliterasi diantaranya; *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, *Participatory Research and Development (PRD)*, *Participation*

Action Research (PAR), Problem based Learning (PBL), Project based learning (PBL), Experiential Learning (EL)(E. K. Sujarwo, 2021).

Masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

1. *Rapid Rural Appraisal (RRA)*

RRA merupakan teknik identifikasi mengenai keadaan suatu wilayah secara cepat. Biasanya kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh pihak luar tanpa atau sedikit partisipasi dari masyarakat setempat. RRA digunakan untuk mengumpulkan informasi secara akurat, dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pemberdayaan masyarakat yang berbasis ekoliterasi harus diambil sesegera mungkin. Pada dasarnya, RRA ialah cara berlatih yang intensif buat menguasai kondisi dan situasi masyarakat dan lingkungan sekitar, dicoba berkali-kali, serta kilat. RRA mempunyai 3 rancangan dasar ialah; (a) perspektif sistem, (b) pencatatan data, c) triangulasi dari pengumpulan informasi, serta (d) pengumpulan informasi serta analisa dengan cara berkali-kali.

2. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

PRA salah satu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri atas warga masyarakat yang diberdayakan, seluruh stakeholders dengan difasilitasi oleh pihak luar yang kedudukan lebih dominan sebagai fasilitator ataupun penyedia. PRA merupakan sesuatu tata cara pendekatan berlatih mengenai situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dari, oleh dan untuk warga masyarakat. Pengertian pemberdayaan di sini, mempunyai arti luas karena meliputi juga kegiatan mengkaji, menyadarkan, merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan mendampingi tindak lanjut. Tujuan utama PRA adalah untuk menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat, keadaan dan potensi masyarakat.

3. *Participatory Research and Development (PRD)*

Pemberdayaan masyarakat berbasis ekoliterasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipasi dan pembangunan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. PRD merupakan wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya, dan (b) sosialisasi, promosi dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab. PRD dilakukan melalui tahapan; 1) *assessment* atau penelitian awal, 2) Menyusun desain, 3) mengembangkan model, 4) menguji model, 5) Diseminasi dan sosialisasi.

4. *Participation Action Research (PAR)*

PAR adalah proses dimana kelompok masyarakat yang berusaha melakukan studi masalah masyarakat secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakannya. Pada dasarnya, PAR merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang

sedang berlangsung (dimana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan pada unit yang lebih kecil ke arah yang lebih baik. PAR terdiri atas tiga kata yang selalu berhubungan seperti daur (siklus), yaitu partisipasi, riset, dan aksi. Artinya hasil riset yang telah dilakukan secara partisipatif kemudian diimplementasikan ke dalam aksi, dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi yang kemudian menjadi bahan untuk riset kondisi subjek penelitian setelah aksi.

5. *Problem based Learning* (PBL)

PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Untuk memberdayakan masyarakat berbasis ekoliterasi, PBL dapat diterapkan melalui masyarakat akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu dan problematika lingkungan sekitar. Peran fasilitator adalah memantau aktivitas anggota masyarakat, memfasilitasi proses pemberdayaan dan menstimulasi masyarakat dengan pertanyaan yang berbasis lingkungan.

6. *Experiential Learning*

Pendekatan/model ini menekankan pada sebuah model pembelajaran yang holistik dalam proses belajar. *Experiential learning*, pengalaman mempunyai peran sentral dalam proses belajar. Model *experiential learning* melibatkan masyarakat

secara langsung dalam masalah dan isu yang dipelajari. Belajar menurut model *experiential learning* merupakan proses penciptaan pengetahuan melalui kombinasi antara mendapatkan pengalaman dan mentransformasi pengalaman (Lestari, 2014). *Experiential learning* mengajak peserta didik untuk memandang secara kritis kejadian yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan penelitian sederhana untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dilingkungan sekitar, kemudian menarik kesimpulan bersama. Model *experiential learning* terdiri atas 4 tahapan, yaitu *concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation*. Dalam hal ini, *experiential learning* menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajar mengembangkan kapasitas dan kemampuan dalam proses pembelajaran.

7. *Project based Learning* (PjBL)

Project based learning adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Untuk pemberdayaan masyarakat berbasis ekoliterasi merupakan model pemberdayaan/pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai medianya. Oleh karena itu, dalam prosesnya masyarakat yang belajar akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, serta sintesis untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar (kognitif, afektif, dan psikomotoriknya). PjBL menggunakan masalah dan proyek sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan dalam beraktivitas secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

8. Pendekatan Andragogi

Kelompok pemberdayaan masyarakat berbasis ekoliterasi adalah orang dewasa, maka dalam implementasinya perlu menerapkan pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi merupakan ilmu dan seni membelajarkan orang dewasa. Orang dewasa telah memiliki konsep diri yang mampu mengarahkan dirinya sendiri, orang dewasa telah memiliki banyak pengalaman yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar, orang dewasa memiliki orientasi belajar untuk memecahkan permasalahan hidup, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bab IX

Implementasi Pemberdayaan Berbasis Ekoliterasi

Masa pasca buta huruf pada hakikatnya adalah suatu masa di mana beberapa aspek tradisi lisan (pra-keaksaraan) terlahir kembali namun bercampur dengan ciri-ciri sastra yang tersisa. Dengan demikian, kearifan berorientasi alam yang secara alami terdapat dalam tradisi lisan dapat terlahir kembali pada masa ini. Sayangnya, aspek-aspek tertentu terhambat oleh sisa literasi. Salah satu aspek kunci dari tradisi lisan Renaisans adalah cara penerimaan teks dilakukan secara langsung, tanpa penundaan. Keterlambatan yang dimaksud terletak pada bagaimana masyarakat melek huruf mampu menyampaikan pesan dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mendapat respon segera dari penerima informasi (Ihsan, 2019). Sayangnya, banyak aspek penting tradisi lisan yang tidak muncul kembali karena terhalang oleh sisa-sisa literasi. Salah satunya adalah

komunitas *word-of-mouth* secara alami menerima informasi lengkap saat itu juga, sehingga memungkinkan mereka memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu hal. Sebaliknya, komunitas melek huruf mungkin terlebih dahulu “menyimpan” teks tersebut sebelum membacanya kembali di waktu, tempat, dan keadaan yang berbeda, sehingga menghilangkan akar teks tersebut dan memisahkannya dari keutuhan teks. Di era pasca-keaksaraan, sifat terisolasi dari teks ini masih ada, apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin kompleks. Teks menjadi semakin terfragmentasi sehubungan dengan integritas sumbernya.

Berdasarkan konteks pengetahuan ekologi, inilah yang penting. Untuk dapat memahami prinsip-prinsip alam, manusia harus mampu melihat alam dalam paradigma organik totalnya, dan hal ini harus dilakukan dalam interaksi utuh dengan alam memandangi alam sebagaimana adanya sebuah teks. Artinya untuk memahami prinsip-prinsip alam, seseorang harus hadir dan menyatu dengan alam itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu upaya pendidikan lingkungan hidup yang paling efektif adalah dengan mengajak masyarakat untuk hidup langsung dengan alam. Namun hal tersebut praktis tidak mungkin dilakukan karena jumlah penduduk kini sudah mencapai angka yang sangat membutuhkan efisiensi ruang. Hal ini berarti sekolah berbasis alam telah menjadi sebuah kemewahan yang hanya dapat diakses oleh segelintir kelompok.

Alternatif lain adalah dengan mengoptimalkan potensi penuh dari era pasca-keaksaraan, di mana teks terus mengalami transformasi, bahkan melampaui hiperteks. Aspek-aspek tertentu dari Industri 4.0, seperti kecerdasan buatan dan augmented reality, secara radikal merevolusi penulisan, menjadikannya lebih dari sekedar

literasi. Misalnya saja teknologi virtual reality yang mulai tersedia bagi masyarakat kini dapat menyajikan teks secara lebih lengkap, dimana informasi visual yang disajikan bersifat omnidirection sehingga menimbulkan persepsi yang unik, dibandingkan teknologi sebelumnya dengan visualisasi informasi. Membatasi karena ukuran layar yang terbatas. Namun masih belum sempurna selama virtualisasi realitas yang diusulkan tidak melibatkan seluruh indera. Untuk bisa merasakan alam seutuhnya, seluruh indera harus diaktifkan secara sinergis, seperti perasaan saat berada langsung di alam, mulai dari hembusan angin, udara yang dihirup, hingga suara-suara samar di sekitarnya. Salah satu aspek literasi yang sulit diabaikan dalam hal ini adalah jarak antara sumber teks dan pembaca. Sekalipun teknologi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyajikan teks-teks alam sekomprehensif mungkin, alam akan selalu menjauhi manusia, karena alam yang dihadirkan bukanlah alam melainkan buatan, virtualisasinya. Bahkan ketika teks tersebut sampai kepada pembaca, teks tersebut disajikan hanya sebagai kumpulan sebagian.

Konsep pengetahuan ekologi penting tidak hanya dalam kemampuannya untuk ditransmisikan tetapi juga dalam makna teks itu sendiri dalam kehidupan pembacanya, karena masyarakat lisan secara langsung mengisi kehidupan sehari-hari dengan prinsip-prinsip alam. Kesadaran lingkungan tidak akan pernah sempurna, sehingga sulit mencapai literasi lingkungan di era pasca-keaksaraan. Mungkin naif jika berharap kesadaran lingkungan hidup dapat ditanamkan secara utuh di zaman ini, apalagi jika bentuk idealnya adalah kearifan lisan masyarakat telah mentransformasikan prinsip-prinsip alam menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, konsep keberlanjutan akan tetap menjadi konsep eksternal

yang harus dikonstruksi secara artifisial melalui berbagai pengetahuan dan strategi karena tidak akan pernah bisa diintegrasikan kembali secara alami menjadi prinsip kehidupan sehari-hari.

Satu-satunya pilihan adalah mengoptimalkan seluruh aspek promosi mulut ke mulut sambil menghilangkan beberapa sisa pengetahuan yang menghambat kesadaran lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ada. Residu literasi penghambatan yang dimaksud mencakup cara berpikir tekstual yang selalu memperlakukan hubungan antara manusia dan alam sebagai subjek-objek, bukan intersubjektif. Tujuan besarnya adalah mengganti model mekanis modern yang sudah mapan dengan model holistik organik yang berorientasi pada alam. Suka atau tidak suka, budaya literasi menjadi agen model mekanistik karena mendorong pemikiran analitis, yang mana segala sesuatunya dipisahkan daripada dilihat sebagai satu kesatuan yang organik. Pada akhirnya, kesadaran ekologis akan selalu menjadi sesuatu yang perlu dipaksakan karena hampir tidak mungkin muncul secara alami. Di sisi lain, perkembangan teknologi menjanjikan banyak manfaat yang dapat dioptimalkan untuk melatih kesadaran ekologis secara paksa.

Dewasa ini, wirausaha/ bisnis ekologis masih jarang diminati oleh seseorang yang sebenarnya ini merupakan gerakan ekologis disamping memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan juga berupaya membangun konsep bisnis yang ramah lingkungan. Sebagai contoh banyak lahan kosong yang masih belum dimanfaatkan, dan disitulah sistem ekonomi kerakyatan akan terbangun guna melemahkan kekuatan kapitalis yang selalu ingin memberikan suplay berbagai macam barang dan jasa (Sujarwo, Trisanti, 2017). Sistem tersebut tentu dapat menjadi kolaborasi ekologis yang membantu

konsep pembangunan berkelanjutan dimana berkurangnya jumlah angka kemiskinan karena ekonomi kerakyatan berjalan sempurna.

A. Latar Belakang

Ecoliteracy yang bertujuan pada pembentukan karakter peduli lingkungan sering dianggap bertolakbelakang dengan kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi sering membuat lingkungan alam rusak, padahal kelestarian alam bisa diselaraskan dengan teknologi. Hal ini terlihat dari ruang lingkup *ecoliteracy* yaitu sistem alami, sistem sumber daya dan sistem manusia (McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrie, 2013). Sistem alami terdiri atas lingkungan bumi dan biosfer. Sistem sumber daya terdiri atas pendistribusian sumber daya alam, konsumsi, manajemen, dan konservasi, sumber daya abiotik, sumber daya biotik, degradasi dan basis sumber daya. Terakhir, sistem manusia terdiri atas hubungan manusia dan lingkungan, sistem teknologi, sistem sosial, kesadaran dan perlindungan lingkungan.

Dalam konteks pengetahuan ekologi, inilah yang penting. Untuk dapat memahami prinsip-prinsip alam, manusia harus mampu melihat alam dalam paradigma organik totalnya, dan hal ini harus dilakukan dalam interaksi utuh dengan alam memandangi alam sebagaimana adanya sebuah teks. Artinya untuk memahami prinsip-prinsip alam, seseorang harus hadir dan menyatu dengan alam itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu upaya pendidikan lingkungan hidup yang paling efektif adalah dengan mengajak masyarakat untuk hidup langsung dengan alam. Namun hal tersebut praktis tidak mungkin dilakukan karena jumlah penduduk kini sudah mencapai angka yang sangat membutuhkan efisiensi ruang. Hal ini berarti

sekolah berbasis alam telah menjadi sebuah kemewahan yang hanya dapat diakses oleh segelintir kelompok. Salah satu bagian terpenting tujuan dari *ecoliteracy* adalah karakter peduli lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Capra dan Wooltorton bahwa tujuan dari *ecoliteracy* adalah kepedulian lingkungan dan sikap kritis terhadap lingkungan (*spirit/connectional*).

Alternatif lain adalah dengan mengoptimalkan potensi penuh dari era pasca- keaksaraan, di mana teks terus mengalami transformasi, bahkan melampaui hiperteks. Aspek-aspek tertentu dari Industri 4.0, seperti kecerdasan buatan dan augmented reality, secara radikal merevolusi penulisan, menjadikannya lebih dari sekedar literasi. Misalnya saja teknologi *virtual reality* yang mulai tersedia bagi masyarakat kini dapat menyajikan teks secara lebih lengkap, dimana informasi visual yang disajikan bersifat *omnidirection* sehingga menimbulkan persepsi yang unik, dibandingkan teknologi sebelumnya dengan visualisasi informasi. membatasi. karena ukuran layar yang terbatas. Namun masih belum sempurna selama virtualisasi realitas yang diusulkan tidak melibatkan seluruh indera. Untuk bisa merasakan alam seutuhnya, seluruh indera harus diaktifkan secara sinergis, seperti perasaan saat berada langsung di alam, mulai dari hembusan angin, udara yang dihirup, hingga suara-suara samar di sekitarnya. Salah satu aspek literasi yang sulit diabaikan dalam hal ini adalah jarak antara sumber teks dan pembaca. Sekalipun teknologi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyajikan teks-teks alam sekomprehensif mungkin, alam akan selalu menjauhi manusia, karena alam yang dihadirkan bukanlah alam melainkan buatan, virtualisasinya. Bahkan ketika teks tersebut sampai kepada pembaca, teks tersebut disajikan hanya sebagai kumpulan sebagian.

Konsep pengetahuan ekologi penting tidak hanya dalam kemampuannya untuk ditransmisikan tetapi juga dalam makna teks itu sendiri dalam kehidupan pembacanya, karena masyarakat lisan secara langsung mengisi kehidupan sehari-hari dengan prinsip-prinsip alam. Kesadaran lingkungan tidak akan pernah sempurna, sehingga sulit mencapai literasi lingkungan di era pasca-keaksaraan. Mungkin naif jika berharap kesadaran lingkungan hidup dapat ditanamkan secara utuh di zaman ini, apalagi jika bentuk idealnya adalah kearifan lisan masyarakat telah mentransformasikan prinsip-prinsip alam menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, konsep keberlanjutan akan tetap menjadi konsep eksternal yang harus dikonstruksi secara artifisial melalui berbagai pengetahuan dan strategi karena tidak akan pernah bisa diintegrasikan kembali secara alami menjadi prinsip kehidupan sehari-hari.

Satu-satunya pilihan adalah mengoptimalkan seluruh aspek promosi mulut ke mulut sambil menghilangkan beberapa sisa pengetahuan yang menghambat kesadaran lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ada. Residu literasi penghambatan yang dimaksud mencakup cara berpikir tekstual yang selalu memperlakukan hubungan antara manusia dan alam sebagai subjek-objek, bukan intersubjektif. Tujuan besarnya adalah mengganti model mekanis modern yang sudah mapan dengan model holistik organik yang berorientasi pada alam. Suka atau tidak suka, budaya literasi menjadi agen model mekanistik karena mendorong pemikiran analitis, yang mana segala sesuatunya dipisahkan daripada dilihat sebagai satu kesatuan yang organik. Pada akhirnya, kesadaran ekologis akan selalu menjadi sesuatu yang perlu dipaksakan karena hampir tidak mungkin muncul secara alami (Kusumawardani et al.,

2023). Di sisi lain, perkembangan teknologi menjanjikan banyak manfaat yang dapat dioptimalkan untuk melatih kesadaran ekologis secara paksa.

Dewasa ini, wirausaha/ bisnis ekologis masih jarang diminati oleh seseorang yang sebenarnya ini merupakan gerakan ekologis disamping memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan juga berupaya membangun konsep bisnis yang ramah lingkungan. Sebagai contoh banyak lahan kosong yang masih belum dimanfaatkan, dan disitulah sistem ekonomi kerakyatan akan terbangun guna melemahkan kekuatan kapitalis yang selalu ingin memberikan suplay berbagai macam barang dan jasa. Sistem tersebut tentu dapat menjadi kolaborasi ekologis yang membantu konsep pembangunan berkelanjutan dimana berkurangnya jumlah angka kemiskinan karena ekonomi kerakyatan berjalan sempurna.

B. Tujuan

Program keluarga harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Program ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan, karena tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan saja namun lebih pada upaya untuk dapat merubah pola pikir dari masyarakat. Sehingga masyarakat dapat lebih berdaya dan dapat mengangkat taraf hidupnya. Proses penyadaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah diupayakan melalui kegiatan pembelajaran berbasis kelompok yang dikenal dengan istilah Program Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau sering dikenal dengan *Family Development Session (FDS)*.

FDS merupakan salah satu kegiatan Program Keluarga Harapan sebagai proses pendidikan berbasis kelompok yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kelompok sasaran sehingga bisa memberdayakan keluarganya tanpa bergantung uluran bantuan. Dalam pelaksanaannya, SDM PKH dalam hal ini Pendamping PKH tidak hanya bertugas sebagai fasilitator dalam penyaluran bantuan, akan tetapi juga memiliki peran menyampaikan materi-materi terkait keluarga dalam upaya memberikan penyadaran pada kelompok keluarga.

Proses pembelajaran melalui kelompok yang dilakukan oleh Pendamping PKH pada dasarnya telah berjalan dengan pemberian materi terkait pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial. Dari pemberian materi ini tentu sedikit banyak telah memberikan pengetahuan kepada para keluarga sasaran, akan tetapi merunut dari materi yang diberikan tersebut akan lebih bermakna bilamana model pembelajaran ekoliterasi diterapkan dalam proses pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Pada prinsipnya model ekoliterasi akan lebih banyak menekankan pembelajaran yang berdasarkan potensi local/ lingkungan sekitar. Sehingga dalam prosesnya kelompok sasaran akan diajak untuk menyadari dari berbagai permasalahan dan potensi yang ada di sekitarnya, untuk dijadikan pijakan atau dasar pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang berbasis lingkungan ini tentu memberikan pandangan sederhana bagi keluarga sasaran untuk melakukan pengoptimalan potensi berdasarkan kemampuannya. Secara umum proses pembelajaran model ekoliterasi ini memiliki tujuan:

.....

1. Meningkatkan kapabilitas inovasi

Kapasitas inovasi dimaknai sebagai kemampuan individu atau lembaga dalam menghasilkan produk/layanan, proses, pemasaran, dan sebagainya yang lebih bermakna/kebaruan (*novelty*) dan membawa manfaat. Dengan pemahaman terkait ekoliterasi maka KPM akan mengkombinasikan berbagai potensi dan sumber daya pendukung untuk meningkatkan kesejahteraannya, hal ini merupakan proses adaptasi yang dibutuhkan KPM agar mampu bertahan serta memberdayakan diri terutama pada era pandemic Covid-19 seperti saat ini. Kesulitan ekonomi di masa pandemic Covid-19 ini mau tidak mau membuat keluarga pra sejahtera dituntut untuk dapat bertahan dengan memanfaatkan dan mengembangkan berbagai potensi yang ada, sehingga model ekoliterasi ini sangat layak untuk diterapkan.

2. Meningkatkan ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Melihat kondisi masyarakat di masa pandemic Covid-19 ini, banyak ketidakpastian yang timbul karena pekerjaan yang menjadi tumpuan tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga memunculkan ancaman bagi ketahanan keluarga. Dengan penerapan model ekoliterasi ini diharapkan keluarga dapat meningkatkan ketahanannya melalui upaya pengelolaan potensi lokal/sumber daya yang ada khususnya dalam upaya meningkatkan kemakmuran. Sehingga dalam perjalanannya nanti

ada alternatif yang bisa diandalkan Ketika pekerjaan utama yang dijadikan tumpuan tidak dapat memberikan hasil yang maksimal.

C. Materi Ajar

Ecoliteracy atau sering juga disebut dengan kecerdasan ekologi. Berasal dari kata Yunani yaitu *oikos* (“habitat”) dan *logos* (“ilmu”) yang dapat dimaknai kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya sekitarnya secara harmonis tanpa mengurangi fungsi atau merusaknya. Kecerdasan ekologi adalah kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap ekologis tempat kita berada (Goleman 2010). Oleh karena itu penanaman sikap ramah lingkungan merupakan sikap yang harus dimiliki setiap individu. Individu yang memiliki kesadaran mengenai lingkungan akan dapat menselaraskan perkembangan pembangunan dengan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis antara masyarakat dan lingkungan. Namun, tentunya sikap peduli terhadap lingkungan tidak akan hadir dengan sendirinya, perlu adanya pengenalan serta pembinaan agar sikap ini dapat menjadi karakter khususnya untuk masyarakat secara luas. Sehingga dalam upaya mewujudkan kecerdasan ekologi kepada masyarakat, dalam panduan model ini memuat materi yang akan menjadi bahan pembelajaran, merunut pendapat dari Goleman et al. (2012) mengemukakan lima poin untuk mengembangkan sikap *ecoliteracy* yaitu sebagai berikut:

1. *Develop empathy for all forms of life*
 2. *Embrace sustainability as a community practice*
 3. *Make the invisible visible*
 4. *Anticipate unintended consequences*
 5. *Understand how nature sustains life*
-

D. Metode Belajar

Metode pembelajaran yang digunakan dalam model ekoliterasi ini adalah *micro teaching*. *Microteaching* yaitu teknik pelatihan yang diorientasikan untuk mengajarkan keterampilan mengajar. Dalam metode ini, pelatih atau pengajar menggunakan situasi dan pengajaran nyata untuk mengembangkan keterampilan tertentu, dalam hal ini adalah mengenai keterampilan ekoliterasi dan pengembangan kapabilitas inovasi keluarga penerima manfaat. Selain itu, dalam program pelatihan, sasaran dibantu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang seni mengajar, sehingga diharapkan pendamping PKH dapat mengaplikasikan metode pengajaran yang menarik bagi para keluarga penerima manfaat.

Metode ini merupakan yang terbukti untuk mencapai peningkatan besar dalam pengalaman instruksional. Melalui *microteaching*, pendamping PKH diorientasikan dapat melakukan pengajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran orang dewasa dan berbasis pengalaman nyata. Perubahan tingkah laku melalui pembelajaran berbasis aktivitas, latihan, atau pengalaman merupakan salah satu yang menjadi fokus pada strategi pembelajaran. Ketika pendamping PKH dapat dipandang lebih berpengalaman, maka belajar menjadi lebih efektif. Kualitas terpenting dari peserta sesi *microteaching* adalah kemampuan untuk memberi dan menerima umpan balik yang konstruktif dengan pikiran terbuka dan mencapai tujuan belajar-mengajar yang tepat. Selain itu, meningkatkan kepercayaan diri pendamping untuk melakukan pendampingan dalam suasana persahabatan.

E. Media Ajar

Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran model ekoliterasi sangat ditentukan oleh tahapan pembelajaran. Dalam tahap penyampaian materi tentu media yang dibutuhkan adalah modul, ATK, LCD ataupun media pendukung pembelajaran lainnya. Sedangkan dalam proses pembelajaran berbasis masalah/ potensi/ lingkungan maka dapat memanfaatkan lingkungan sekitar beserta media pendukung lainnya untuk menunjang kebutuhan pembelajaran kelompok sasaran.

F. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran model ekoliterasi bagi keluarga penerima manfaat PKH adalah melalui *Self evaluation*. *Self evaluation* adalah prosedur sistematis untuk mengamati, menganalisis, dan menilai tindakan profesional diri sendiri dan hasilnya untuk menstabilkan atau memperbaiki kinerja tersebut. Ini dapat terjadi pada individu atau pada tingkat organisasi. Mengevaluasi diri berarti orang mengeksplorasi dan mengevaluasi pekerjaan profesional mereka sendiri.

Evaluasi diri, seseorang akan memiliki kesempatan untuk merefleksikan diri dan mempertimbangkan apa kekuatan dan kelemahannya. Hal ini menjadi penting dalam proses pembelajaran orang dewasa yang sangat menghargai pengetahuan/ pengalaman seseorang. Sehingga kelompok sasaran dalam pembelajaran model ekoliterasi ini tidak memiliki kesenjangan dengan peserta pembelajaran lainnya, karena yang dapat menilai kebermanfaatan maupun kekurangannya adalah dirinya sendiri, hal ini tentu akan menjadi motivasi lebih bagi peserta pembelajaran untuk

meningkatkan potensi-potensi diri maupun lingkungannya untuk mencapai kapabilitas dan ketahanan keluarga.

Bab X

Studi Kasus Pemberdayaan Berbasis Ekoliterasi

Kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Terkait hal tersebut, pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan yang kini tidak hanya pada pemberian bantuan saja, namun pada upaya pemberdayaan yang bertujuan untuk merubah mindset masyarakat. Ciri keberdayaan itu sendiri dapat dilihat dari beberapa *indicator* yaitu *power over personal choices and life, power over the assertion of human rights, power over the definition of need, power over ideas, power of institutions, power over resources, power over economic activity, power over reproduction* (Jim Ife, 2008). Upaya itu tidak akan terlepas dari proses penyadaran seperti pendapat Paulo Freire bahwa ada tiga tingkat kesadaran yang dari masyarakat untuk dapat menuju kata berdaya. Dengan berupaya untuk mengubah kesadaran magis menjadi kesadaran kritis.

Keluarga sebagai kesatuan sosial terkecil dari masyarakat yang memiliki posisi sentral dalam upaya pembangunan. Seperti yang tertuang pada Pasal 5 (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, keluarga ditempatkan pada inti dan sentral pengembangan kekuatan bangsa dan negara, karena secara fenomenologis rakyat menyatu pada keluarga-keluarga. Kekuatan negara dan bangsa juga bersumber dari kekuatan keluarga. Sedangkan kelemahan keluarga adalah cermin buram pemerintah dalam menjalankan roda manajemen kepemimpinannya mengayomi, memberikan bimbingan, motivasi, stimulasi, dan variasi alternatif bagi rakyat melakukan pilihan hidupnya (Prof. Dr. Rusmin Tumanggor. M.A, 2010).

Sejak awal Maret 2020 hingga akhir Oktober 2020, jumlah kasus terpapar COVID-19 di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Selain sektor kesehatan, COVID-19 juga mengancam kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan. Pada aspek kehidupan sosial misalnya, terjadi hubungan sosial yang terbatas, disorganisasi dan disfungsi sosial terjadi di masyarakat. Selain itu, sektor perekonomian terdampak cukup signifikan sebagai akibat dari penerapan PSBB. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak langsung telah mengakibatkan sektor industri dan jasa melakukan berbagai langkah untuk mengurangi biaya produksi dengan cara menutup pabrik/kantor, merumahkan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Covid 19 memberikan efek domino pada kondisi satu keluarga, karena tentu acap kali mengalami perubahan fungsi. Pandemi ini tidak sedikit kepala keluarga yang kemudian kehilangan pekerjaan,

.....

khususnya yang bergelut di sektor informal/swasta. Selain itu, pandemik ini juga menjadi tantangan dalam ketahanan keluarga. Merespon situasi yang telah mengancam berbagai sektor kehidupan, pada akhirnya pemerintah telah menerapkan kebijakan *New Normal*. Sesuai dengan fungsi keluarga sebagai tempat bersosialisasi dan memperoleh pendidikan maka keluarga dapat berperan sebagai “agen perubahan” dalam beradaptasi menghadapi New Normal. Dukungan keluarga sangat penting dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu, sistem kesehatan juga perlu beradaptasi dengan lebih menekankan pada peran keluarga (*family centered*) (Hart, J. L., Turnbull, A. E., Oppenheim, I. M., & Courtright, 2020). Fenomena pandemi Covid 19 ini yang kemudian menuntut masyarakat untuk adaptasi pada satu perubahan kondisi. Sehingga kapasitas inovasi menjadi satu hal penting, yang kemudian dimaknai bersama sebagai satu kemampuan individu atau lembaga dalam menghasilkan produk/layanan, proses, pemasaran, dan sebagainya yang lebih bermakna/kebaruan (*novelty*) dan membawa manfaat. Kapasitas inovasi dibutuhkan oleh satu kelompok sebagai keunggulan kompetitif dalam perkembangan lingkungan (Momeni, M., Nielsen, S.B., & Kafash, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghasilkan satu model pembelajaran sebagai upaya peningkatan kapabilitas inovasi untuk ketahanan keluarga melalui ekoliterasi.

Berdasarkan kasus di atas, berikut contoh hasil produk dari penelitian studi kasus pemberdayaan berbasis ekoliterasi:

BUKU PRODUK PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA BERBASIS EKOLITERASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program pemberian bantuan sosial tersebut merupakan program bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Secara umum, PKH sudah memberikan manfaat langsung bagi penerima terutama dalam hal pembiayaan pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat, akan tetapi belum nampak dampak signifikan terhadap status sosial ekonomi dan keterukuran efektivitas pelaksanaannya (Nainggolan, 2019; Risna Resnawaty, 2017). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masih banyak tantangan program PKH dalam proses pengentasan kemiskinan dari sudut pandang kesejahteraan sosial. Selain itu, belum ada indikator untuk mengukur perubahan dan peningkatan penerima program, sehingga dikhawatirkan jumlahnya terus bertambah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan menjadi sangat tinggi.

Kebergantungan keluarga penerima manfaat terhadap bantuan berupa uang masih menjadi issue dalam program peningkatan kesejahteraan warga prasejahtera. Terutama saat terjadi pandemic Covid-19, konsekuensi signifikan harus dialami berbagai sektor

kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian. Sektor perekonomian merupakan salah satu yang secara signifikan terpengaruh. Kasus pemutusan hubungan kerja pada banyak karyawan swasta, pembatasan aktivitas fisik yang berdampak pada para penjual barang dan jasa, turunnya omset para wirausahawan, sampai pada terjadinya kebangkrutan di berbagai perusahaan besar. Hal tersebut kemudian berkonsekuensi pada keluarga sebagai unit kecil pada masyarakat. Pandemi mengakibatkan tidak sedikitnya kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, anggota keluarga mengalami stres karena stabilitas keluarga. Pandemi secara faktual meningkatkan jumlah keluarga prasejahtera yang membutuhkan bantuan.

Orientasi program yang lebih ke arah pemberdayaan sehingga keluarga penerima manfaat bisa lebih mandiri dipandang lebih urgen dibandingkan dengan berfokus pada jumlah nominal bantuan. Solusi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan masih menyisakan masalah baru yaitu meningkatkan potensi meningkatkan masyarakat konsumtif, ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta cenderung tidak berdaya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya sebuah upaya baru mengenai program yang berorientasi peningkatan kesadaran dan ketahanan masyarakat prasejahtera menjadi lebih mandiri dan berdaya.

Keberdayaan akan termanifestasi melalui kemampuan keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Kegiatan *Focused Group Discussion* (FGD) yang dilakukan bersama 13 orang pendamping PKH serta 12 orang perwakilan keluarga penerima manfaat di Kecamatan

Pandak Kabupaten Bantul menunjukkan terdapat berbagai potensi dan masalah terkait ketahanan keluarga, kapabilitas inovasi, serta kompetensi ekoliterasi.

Kondisi objektif yang terungkap melalui FGD bersama pendamping PKH menjadi dasar dari pengembangan model ekoliterasi berbasis ketahanan keluarga ini. Latar belakang Pendidikan keluarga penerima manfaat di daerah Kecamatan Pandak bervariasi mulai dari SD, SMP, SMA, S1 dengan rasio dominan lulusan SMP. Secara administratif diungkapkan bahwa keluarga muda sudah banyak yang menjadi penerima manfaat PKH. Mata pencaharian masyarakat antara lain: buruh bangunan, petani padi, tukang batu, pabrik pakaian dan sarung tangan yang lokasinya dekat dengan domisili masyarakat setempat, *serabutan* – pekerjaan tidak tetap di berbagai bidang, bisnis online yang termasuk baru dilakukan setelah pandemic terjadi. Beberapa keluarga penerima manfaat mengungkap ada kepala keluarga yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Penghasilan KPM di daerah setempat beragam mulai dari yang sesuai UMR untuk masyarakat yang menjadi buruh pabrik, sedangkan untuk pekerjaan buruh tani, bangunan, dan serabutan penghasilan yang didapat tidak menentu.

Keluarga penerima manfaat yang mengikuti graduasi (program pengunduran diri sebagai keluarga penerima manfaat Program PKH sampai Mei 2021 sejumlah 142 keluarga atau 3,6% dari keseluruhan jumlah keluarga penerima manfaat. Latar belakang keluarga penerima manfaat yang mengikuti graduasi sudah atas dasar kesadaran diri sendiri. Potensi sumber daya alam yang ada di masyarakat setempat diantaranya pertanian, perkebunan melinjo, dan masih banyaknya keluarga yang memiliki lahan pekarangan

yang luas. Keluarga penerima manfaat mengungkapkan beberapa upaya pemanfaatan lahan yang dimiliki yaitu menanam jeruk lemon, pepaya jenis California, sayuran seperti terung, cabai, ciplir, tanaman hias. Selain itu, beberapa keluarga melakukan ternak ikan lele dan tombro. Selain itu, terdapat potensi lain yaitu gerakan komunitas pemanfaatan lahan di luar program PKH yang sudah berjalan seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), bank sampah, pembuatan souvenir yang dipasarkan UMKM. Sejak pandemik Covid-19 terjadi, beberapa ibu-ibu keluarga penerima manfaat menanam tanaman hias dan sayuran untuk dijual.

Disamping potensi yang diungkapkan oleh pendamping, terdapat beberapa masalah terkait ketahanan keluarga dan kapabilitas inovasi KPM di daerah Kec. Pandak. *Pertama*, masih minimalnya inisiatif dan motivasi memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum ada gerakan pemberdayaan bersama dalam KPM sendiri. *Kedua*, Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan komunitas pemberdayaan seperti KWT, bank sampah, atau UMKM setempat. *Ketiga*, gaya hidup beberapa keluarga yang konsumtif. *Ketiga*, Keluhan KPM yang kerap kali diterima oleh para pendamping PKH diantaranya: bantuan yang telat masuk ke rekening KPM, anaknya tidak mau sekolah daring, boros pulsa karena seluruh pembelajaran berlangsung online, pengelolaan uang yang kurang baik sehingga tidak mencukupi kebutuhan.

Berdasarkan potensi dan masalah yang terungkap melalui FGD bersama keluarga penerima manfaat dan pendamping PKH nampak bahwa terdapat potensi yang dapat dimaksimalkan melalui upaya-upaya edukasi yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada di daerah setempat.

Pendidikan untuk kehidupan berkelanjutan berbasis tanaman pangan lokal dapat memberikan peranan yang strategis dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk melestarikan dan keberlanjutan kehidupan. Ekoliterasi merupakan salah satu kekuatan yang jika ditingkatkan akan berpengaruh pada peningkatan kapasitas inovasi yang kemudian berimplikasi pada meningkatkan kemandirian dan keberdayaan sebuah keluarga. Sistem kolaborasi ekologis yang membantu konsep pembangunan berkelanjutan dimana berkurangnya jumlah angka kemiskinan karena ekonomi kerakyatan berjalan dapat terwujud jika kesadaran dan kemampuan masyarakat meningkat.

B. Mekanisme

Buku panduan model disusun untuk memberikan gambaran terkait dengan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran model ekoliterasi. Kegiatan pembelajaran pada model ekoliterasi didisain untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif keluarga penerima manfaat. Beberapa hal tentang kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Persiapan yang dilakukan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan fasilitator dan karakteristik keluarga penerima manfaat yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendamping

Pendamping berperan sebagai fasilitator keluarga penerima manfaat selama proses pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini adalah

motivasi dan komitmen pendamping harus diprioritaskan. Pendamping harus memastikan bahwa keluarga penerima manfaat tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi serta mampu mengapresiasi kemajuan belajar keluarga penerima manfaat.

b. Keluarga penerima manfaat

Keluarga penerima manfaat merupakan keluarga prasejahtera yang menerima bantuan bersyarat dari kementerian sosial. Keluarga penerima manfaat terorganisir dalam suatu kelompok tertentu. Setiap keluarga memiliki karakteristik dan pengalaman yang harus mendapat apresiasi sehingga perlu mendapat *feed-back* dan menjadi bahan dalam pembelajaran yang dilaksanakan.

c. Alat dan Bahan Pembelajaran

Proses pembelajaran model ekoliterasi diarahkan untuk memanfaatkan potensi lingkungan sekitar sebagai bahan pembelajaran. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan dapat menggunakan peralatan rumah tangga yang dimiliki oleh masing-masing keluarga sehingga dapat meminimalkan pembiayaan.

2. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan model ekoliterasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yang diantaranya adalah:

a. Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran

Proses monitoring pembelajaran dilakukan oleh pendamping dan keluarga penerima manfaat di setiap jadwal pertemuan kelompok. pendamping dan keluarga penerima manfaat secara bersama-sama memantau aktivitas pembelajaran

untuk mengantisipasi ketidaksesusain hasil pembelajaran dengan tujuan yang diinginkan.

b. Efektivitas Waktu

Estimasi waktu penerapan pembelajaran ini ditentukan berdasar pada kesepakatan antara pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat, mengingat topik pembelajaran tidak sedikit dan harus bersifat kontekstual dengan kebutuhan setiap kelompok. Pendamping dalam hal ini dapat memfasilitasi keluarga penerima manfaat untuk melakukan perencanaan untuk merancang dan mengestimasi waktu yang diperlukan selama pembelajaran berlangsung hingga selesai.

3. Evaluasi

Proses evaluasi yang dilakukan dalam hal ini untuk mengetahui kreativitas dan tingkat inovasi keluarga penerima manfaat melalui unjuk kerja yang telah diselesaikan. Evaluasi dilakukan melalui *self-evaluation* untuk mengetahui tingkat kebermaknaan pembelajaran.

C. Tujuan

Adapun tujuan penulisan buku panduan ini antara lain:

1. Memberikan gambaran tentang persiapan yang dilakukan oleh pendamping PKH sebelum pelaksanaan pembelajaran.
 2. Memudahkan pendamping dalam mengimplementasikan setiap langkah pembelajaran dalam model ekoliterasi untuk memaksimalkan pencapaian tujuan belajar yang diharapkan.
 3. Memberikan gambaran tentang pengaturan lingkungan belajar yang sesuai dalam penerapan model ekoliterasi.
-

4. Memberikan gambaran tentang bentuk evaluasi pembelajaran untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif dan inovatif keluarga penerima manfaat.

D. Penggunaan Buku Panduan

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan buku panduan ini adalah:

1. Bacalah buku panduan dengan seksama.
2. Pahami indikator pembelajaran dengan baik sesuai dengan materi pembelajaran.
3. Sesuaikan langkah pembelajaran model ekoliterasi dengan prinsip pembelajaran *experiential learning*.
4. Siapkan media pembelajaran untuk menstimulasi kreativitas dan inovasi keluarga penerima manfaat.
5. Fokuskan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif keluarga penerima manfaat.
6. Lakukan evaluasi melalui *self-evaluation* untuk mengetahui tingkat kebermaknaan pembelajaran.

BAB II DESIGN MODEL

A. Model Pembelajaran



Sumber daya manusia tentu tidak akan terlepas dari kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh individu atau manusia itu sendiri. Penelitian ini fokus pada kelompok masyarakat paling kecil yaitu keluarga. Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan yang sudah dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*), peneliti menemukan beberapa potensi yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam melakukan pengembangan model pembelajaran. Adapun proses pembelajaran diawali dari analisis peneliti dari kondisi keluarga itu sendiri sebagai input dalam pembelajaran.

Peneliti memiliki pandangan bahwa potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga akan berbeda jika dioptimalkan melalui

dukungan maupun adanya intervensi dari lembaga pendidikan. Potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dapat dioptimalkan melalui fungsi pendidikan pada keluarga. Sedangkan potensi dan sumber daya keluarga dengan dukungan dari lembaga pendidikan, dioptimalkan melalui fungsi dan peran keluarga itu sendiri sebagai pendidik pertama dan utama. Dengan demikian, untuk dapat menguatkan tumbuh kembang anak dan potensi anak maupun pencapaian kesejahteraan anak (*well being*), yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator ketahanan keluarga. Maka pengembangan model pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran terpadu dengan melakukan kolaborasi antara pembelajaran keaksaraan fungsional dan pendidikan keluarga itu sendiri.

Oleh karena itu, pengembangan model pembelajaran ini didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan setelah melakukan studi pendahuluan melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan kelompok sasaran memberikan pemahaman kondisi empirik terkait pelaksanaan program keluarga harapan maupun spesifik pada potensi dan masalah yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat. Adapun potensi dan masalah tersebut, peneliti jadikan sebagai dasar dalam menyusun konsep dan strategi pembelajaran yang diharapkan dapat sesuai dengan kondisi kelompok sasaran. Potensi dan masalah yang kami rangkum sebagai hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa adanya bantuan belum sepenuhnya memberikan kesadaran kepada keluarga penerima manfaat untuk tergerak melakukan satu aksi agar lebih berdaya dan mampu bertahan di tengah derasnya tantangan kehidupan. Kondisi tersebut tentu tidak dipungkiri oleh berbagai faktor. Beberapa faktor

tersebut kemudian kami kelompokkan menjadi masalah yang masih dihadapi oleh keluarga penerima manfaat.

Adapun beberapa masalah tersebut diantaranya perilaku dari keluarga penerima manfaat yang masih terbawa oleh budaya modern yang cenderung pada segala sesuatu yang instan. Sebagai contoh, pembelian bahan pangan maupun sandang yang memilih untuk ke toko-toko modern berlabel dibandingkan dengan toko konvensional (kelontong). Selain itu, kemudahan untuk belanja online juga dilakukan oleh beberapa keluarga penerima manfaat. Beberapa kemudahan tersebut yang kemudian mengeser keinginan menjadi kebutuhan, maupun mengeser prioritas keinginan di atas kebutuhan. Kemudian berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ternyata keluarga penerima manfaat tinggal di daerah pedesaan yang lekat dengan lingkungan yang masih hijau dan asri. Namun masih di temui beberapa sudut di lingkungan yang masih belum tertata dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan yang mendukung untuk pelestarian lingkungan sekitar yang juga masih jarang dilakukan karna simpati dari masyarakat yang masih kurang. Selain itu, pola hidup bergantung pada pemberian bantuan, bagi beberapa keluarga penerima manfaat justru terbuai untuk menikmati karena merasa bahwa bantuan tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan. Sehingga enggan untuk melakukan usaha yang lebih untuk dapat meningkatkan pemasukan keluarga.

Berdasarkan tujuan penelitian yang fokus pada upaya peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat diarahkan pada ketahanan keluarga. Hasil kajian teori maupun studi di lapangan menggiring peneliti untuk menguatkan keluarga penerima manfaat dari segi kapabilitas inovasi agar dapat sedikit memberikan stimulant untuk

dapat melakukan satu aksi untuk dapat meningkatkan taraf hidup. Dari peningkatan kapabilitas inovasi tersebut, peningkatan graduasi keluarga penerima manfaat menjadi tujuan jangka panjangnya. Analisis kebutuhan yang dipaparkan di atas menjadi dasar peneliti untuk memantapkan konsep ekoliterasi sebagai pengembangan materi dari kegiatan rutin yang sudah didapatkan keluarga penerima manfaat. Konsep ekoliterasi yang akan dikembangkan sebagai materi berfokus pada pemanfaatan lingkungan melalui penyadaran sikap keluarga penerima manfaat terhadap lingkungan sekitar hingga bagaimana sikap tersebut dapat melandasi aksi keluarga penerima manfaat untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Tujuannya tidak lain adalah untuk dapat meningkatkan penghidupan.

Pembelajaran ekoliterasi nantinya akan dilakukan pada wadah belajar yang sudah dilakukan rutin oleh pendamping program keluarga harapan, yaitu melalui kegiatan *family development session* (FDS). Kegiatan ini rutin dilakukan oleh pendamping untuk dapat memperkuat keluarga penerima manfaat dengan materi-materi yang sudah di siapkan oleh Kementerian Sosial. Materi ekoliterasi yang akan peneliti kembangkan diharapkan dapat menjadi satu materi tambahan untuk pendamping program keluarga tambahan yang sudah di sesuaikan dengan kondisi *real* khususnya masyarakat kabupaten Bantul. Sehingga peneliti akan melakukan penguatan kepada pendamping program keluarga harapan untuk dapat mendalami materi ekoliterasi yang nantinya akan di sampaikan melalui kegiatan *family development session*.

Microskills merupakan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan penguatan pendamping program keluarga harapan. *Microskills approach* adalah teknik konseling yang efektif

perlu menggunakan teknik tertentu dalam jenis yang lebih luas dari keterampilan. Keterampilan tersebut adalah *attending behaviors* (*listening*) dan *influencing behaviors* (*speaking*). *Attending behaviors* → *eye contact, body language, verbal*. *Influencing behaviors* → melibatkan pelatih dalam pertumbuhan atau perubahan keluarga. Pelatih dalam hal ini pendamping PKH cenderung harus lebih mendengarkan dan menyediakan pertukaran komunikasi secara lisan, jika ia ingin memengaruhi perubahan perilaku keluarga.

B. Komponen Model Pembelajaran

1. Program Keluarga Harapan

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil dari masyarakat yang memiliki posisi sentral dalam upaya pembangunan. Seperti yang tertuang pada Pasal 5 (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, keluarga ditempatkan pada inti dan sentral pengembangan kekuatan bangsa dan negara, karena secara fenomenologis rakyat menyatu pada keluarga-keluarga. Kekuatan negara dan bangsa juga bersumber dari kekuatan keluarga. Sedangkan kelemahan keluarga adalah cermin buram pemerintah dalam menjalankan roda manajemen kepemimpinannya mengayomi, memberikan bimbingan, motivasi, stimulasi, dan variasi alternatif bagi rakyat melakukan pilihan hidupnya (Prof. Dr. Rusmin Tumanggor. M.A, 2010).

Merunut dari konsep keluarga di atas, maka sejatinya ketahanan keluarga adalah citra dari sebuah kesuksesan sebuah pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah melakukan sejumlah manuver dengan memberikan stimulus

kepada keluarga yang dinilai kurang berdaya agar mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dari sekian banyak manuver yang dilakukan pemerintah, salah satu yang menonjol adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang saat ini dijalankan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang menysasar masyarakat dengan kriteria rentan miskin ke bawah. Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Kemensos, 2008) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat. Program ini mensyaratkan penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki beberapa kriteria, seperti kriteria Pendidikan, Kesehatan, ataupun disabilitas. Dengan adanya PKH, Keluarga Miskin (KM) didorong untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan juga pendampingan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat, seperti ibu hamil/menyusui, memiki anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan. Memiliki anak SD/MI atau sederajat, memiliki anak SMP/MTs atau sederajat. Memiliki anak SMA/MA atau sederajat. PKH juga diberikan kepada keluarga dengan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Selain itu PKH juga diberikan untuk keluarga

lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Kekhasan Program Keluarga Harapan ini adalah bantuan sosial bersyarat yang mewajibkan KPM memiliki minimal salah satu dari beberapa kriteria yang wajib dimiliki. Berbeda dengan program bantuan sosial lain yang tidak mempertimbangkan kriteria tertentu untuk dapat mengakses bantuan. Selain itu KPM memiliki hak mendapatkan pendampingan yang dilakukan oleh SDM Pendamping PKH terkait penyaluran bantuan, permasalahan bantuan, motivasi serta yang lainnya. Proses pendampingan ini merupakan upaya Program PKH dalam memberikan bekal kepada KPM untuk dapat memanfaatkan bantuan agar mampu menunjang kesejahteraan keluarga.

Kartasasmita menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan Program PKH melalui proses pendampingan telah diupayakan untuk mempersiapkan masyarakat sasaran/Keluarga Penerima Manfaat agar memiliki kesadaran dan persepsi untuk berdaya menghadapi tuntutan kehidupan.

Akan tetapi dalam upaya membangun kesadaran KPM Program Keluarga Harapan tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh SDM Pendamping Program Keluarga Harapan. Tantangan yang muncul tidak hanya sebatas mengubah *mindset* keluarga sasaran, akan tetapi bagaimana menyiapkan keluarga prasejahtera memiliki motivasi hidup *survive*. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang memberikan tekanan kepada keluarga penerima manfaat, mengingat banyak KPM yang bekerja di sektor informal.

Dari data yang didapat di lapangan melalui proses wawancara dan FGD dapat disimpulkan bahwa banyak KPM yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Sehingga upaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah menjadi semakin sulit, karena banyaknya masyarakat yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini.

a. Family Development Session (FDS)

Program pemberdayaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, martabat, penghargaan, kerjasama dan rasa saling memiliki pada komunitas (Julian Gonsalves, Thomas Becker et al., 2005). Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari sosial kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri. Sehingga pemberdayaan melalui *family development session*

adalah suatu program yang melekat pada program pengentasan kemiskinan yang bernama program keluarga harapan (PKH). *Family Development Session* (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan (Dirjen Linjamsos, 2013). *Family Development Session* merupakan unit kegiatan yang terorganisasi dan berkesinambungan. *Family Development Session* dirancang minimum selama satu tahun dengan pertemuan setiap bulan untuk membahas 1-2 modul. *Family Development Session* sebagai pendidikan masyarakat diharapkan mampu merubah kualitas masyarakat sehingga bisa secara mandiri meningkatkan taraf hidupnya. Program *Family Development Session* (FDS) merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal untuk keluarga.

Tujuan dari diadakannya kegiatan pelatihan FDS bagi peserta PKH adalah sebagai media belajar bagi para peserta PKH, dalam hal ini ibu-ibu sebagai pengatur ekonomi keluarga, untuk membantu para keluarga miskin untuk mampu berubah menjadi lebih baik, baik dari segi sumber daya manusia, maupun dari segi ekonomi. Kegiatan ini juga bertujuan agar para peserta nantinya bisa lebih percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat dan lebih mandiri, meskipun program PKH sudah tidak lagi membantu mereka dengan dukungan dana bantuan tunai.

Berdasarkan pada kegiatan pengambilan data, dapat dipahami bahwa kesiapan dari keluarga penerima manfaat masih pada tahap kesadaran yang paling rendah berdasarkan konsep

Paulo Freire yaitu kesadaran naif, yaitu dimana seseorang tersebut masih abai pada satu kondisi dan enggan untuk melangkah pada perbaikan. Sehingga yang masih muncul adalah pola bergantung pada orang lain. Hal ini menjadi tantangan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, kegiatan pendampingan dilakukan dengan selalu memberikan motivasi dan penyadaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk motivasi untuk dapat membangun keluarga yang lebih sejahtera serta penyadaran kepada KPM yang sudah tidak memiliki kelayakan menjadi peserta PKH untuk mengikuti graduasi mandiri, sehingga KPM memiliki kesadaran untuk sukarela mengikuti graduasi mandiri; selalu memastikan kewajiban pengaksesan pemanfaatan fasilitas PKH sesuai komponen, apabila tidak dilakukan akan memperoleh peringatan penangguhan dana bantuan tidak dapat cair; dan manajemen dan penanganan kasus. Selain itu, kegiatan di isi dengan materi mengenai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang memberikan manfaat bagi peserta PKH peningkatan pengetahuan namun belum dapat diterapkan oleh KPM secara baik sehingga kurang dapat memberikan efek pada perubahan tingkah laku. Terkait dengan pemanfaatan dana bantuan yang diterima peserta digunakan sesuai dengan komponen yang dimiliki peserta KPM PKH dengan melampirkan catatan pemakaian dana dan nota apabila ada, bantuan dana ini sangat bermanfaat dalam meringankan beban perekonomian peserta KPM PKH.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa khususnya pada masa pandemi Covid 19 ini, orangtua selalu kalah membagi waktu mendampingi belajar dengan harus bekerja karena banyak pekerjaan orangtua yang tergeser bahkan hilang. Kondisi tersebut menjadikan orangtua menjadi sangat tidak fokus terutama dalam mendampingi belajar. Kemudian terkait dengan pengelolaan keuangan dan motivasi berwirausaha menjadi dua hal yang saling berkaitan. Karena keduanya bersumber pada pendapatan dan modal. Pengelolaan keuangan yang masih sulit dilakukan oleh keluarga penerima manfaat, karena masih ada beberapa kebutuhan yang masih belum dapat tercukupi. Hal itu yang mendasari, keluarga untuk memutar paradigma melakukan usaha sebagai tambahan pendapatan. Ketika akan melakukan usaha selalu terhalang kembali oleh modal. Sehingga keduanya menjadi dua pusaran yang tidak berujung.

b. Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi dimaknai sebagai kemampuan individu atau lembaga dalam menghasilkan produk/layanan, proses, pemasaran, dan sebagainya yang lebih bermakna/kebaruan (*novelty*) dan membawa manfaat. Momeni, Neilsen, & Kafash (2015) mengungkapkan bahwa kapasitas inovasi dibutuhkan oleh organisasi sebagai suatu keunggulan kompetitif dalam perkembangan lingkungan. Menurut mereka, kapasitas ini adalah kemampuan menciptakan layanan atau produk baru, teknologi baru, praktik administratif yang baru, dan sebagai suatu intelegensi dan kreativitas, kemampuan menciptakan belajar yang efektif, dan menciptakan pengetahuan baru.

Inovasi sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang baru yang dapat berupa ide, praktik atau objek yang dipandang baru oleh individu atau kelompok masyarakat, terlepas apakah ide, praktik atau objek tersebut secara objektif baru. Dalam dunia bisnis, kapasitas inovasi suatu organisasi dapat dibedakan menjadi empat yaitu: (a) kapasitas pengembangan teknologi, (b) kapasitas operasi (pekerjaan), dan (c) kapasitas transaksi. Sedangkan menyatakan dalam dunia pendidikan inovasi dapat dilakukan dalam bentuk tiga aspek yaitu: kurikulum atau materi ajar, pendekatan pembelajaran, dan asumsi-asumsi pedagogik. Bentuk inovasi tersebut dapat diperoleh dengan melakukan perubahan baik secara radikal (*radical innovation*) maupaun secara bertahap (*incremental innovation*). Kapasitas inovasi terbentuk apabila dalam lingkungan organisasi terwujud visi dan strategi yang jelas, memiliki kompetensi inti, mengelola ide dan kreativitas, struktur dan sistem organisasi yang mendukung, penciptaan budaya dan iklim dan pengelolaan teknologi yang tepat.

Berdasarkan penjabaran kapasitas inovasi di atas, maka dapat dimaknai bahwa dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga juga diperlukan kapasitas inovasi. Dalam hal ini adalah terkait proses pendampingan KPM PKH dapat dilakukan penguatan inovasi melalui potensi yang ada disekitarnya, salah satunya adalah dengan menanamkan pemahaman ekoliterasi kepada para KPM. Dengan pemahaman terkait ekoliterasi maka KPM akan mengombinasikan berbagai potensi dan sumber daya pendukung untuk meningkatkan kesejahteraannya, hal ini merupakan proses adaptasi yang dibutuhkan KPM agar mampu bertahan serta memberdayakan diri pada era pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Dari hasil wawancara dan FGD yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini mau tidak mau keluarga pra sejahtera dituntut untuk dapat bertahan dengan memanfaatkan dan mengembangkan berbagai potensi yang ada. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan secara pengetahuan maupun finansial maka banyak keluarga pra sejahtera yang kesulitan mengelola ketahanan keluarga khususnya dalam aspek ekonomi. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi *stakeholder* maupun pendamping Program PKH untuk dapat terus memberikan motivasi serta meningkatkan pemahaman kepada keluarga pra sejahtera agar dapat mampu meningkatkan kapasitas inovasinya yang pada akhirnya dapat menjaga ketahanan keluarganya.

c. Ekoliterasi

Istilah ekoliterasi mungkin masih asing di beberapa kalangan masyarakat, akan tetapi jika sudah dijabarkan ke dalam konteks kebiasaan perilaku, sebetulnya beberapa dari kita dapat dikatakan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dikatakan sudah memiliki ekoliterasi jika melakukan proses peningkatan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku berlandaskan ekologi. Lebih sederhana lagi, Capra (2013) menjelaskan ekoliterasi dengan istilah '*melek lingkungan*' yaitu kemampuan atas kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup dengan segala isinya yang memang harus dimanfaatkan secara bijak. Ekoliterasi sering juga disebut dengan kecerdasan ekologi, yakni kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap lingkungan tempat ia berada.

Lima aspek penting dalam pengembangan sikap ekoliterasi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sikap empati.
- b. Mengembangkan praktik pemanfaatan lingkungan untuk ketahanan yang berkelanjutan.
- c. Mengembangkan pembelajaran nyata sangat diperlukan.
- d. Mengembangkan pembelajaran berbasis pencegahan akan bencana ekologis.
- e. Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk mempertahankan kehidupan.

Alasan penting ekoliterasi dalam kehidupan adalah ekoliterasi dapat menjadi upaya pencegahan dalam mengurangi masalah degradasi lingkungan. Selain sebagai gerakan pemanfaatan lingkungan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat, ekoliterasi juga dapat menjadi upaya bisnis yang ramah lingkungan dan menguntungkan. Misalnya, pemanfaatan lahan kosong di halaman rumah yang ditanami cabai, kemangi, tomat, dapat berdampak pada pemangkasan uang belanja rumah tangga dengan ongkos perawatan tanaman yang murah dan mudah. Contoh lain dalam konteks peluang bisnis, misalnya menggunakan halaman masjid yang tidak terpakai untuk menanam beberapa sayuran yang bisa dikonsumsi masyarakat atau bahkan dijual. Dengan skema seperti itu, sistem ekonomi kerakyatan akan terbangun guna melemahkan kekuatan kapitalis yang selalu ingin memberikan *suplay* berbagai macam barang dan jasa. Sistem tersebut tentu dapat menjadi kolaborasi ekologis yang membantu konsep pembangunan berkelanjutan dimana berkurangnya jumlah angka kemiskinan karena ekonomi

kerakyatan berjalan sempurna

d. **Ketahanan Keluarga**

Ketahanan keluarga dimaknai sebagai keadaan dinamis dalam sebuah keluarga yang ditunjukkan oleh sikap ulet, tangguh, dan kematangan secara fisik, material, psikis maupun mental spiritual. Keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan ragam perilaku, pemikiran, dan perasaan tentu memengaruhi hubungan satu sama lain dalam lingkaran keluarga itu sendiri. Terkadang dalam sebuah keluarga tentu terdapat berbagai masalah mulai dari masalah Kesehatan fisik, komunikasi, hingga persoalan ekonomi. Idealnya, masalah-masalah tersebut akhirnya mau tidak mau menuntut seluruh anggota keluarga untuk berkompromi dan beradaptasi, bersama-sama menemukan jalan keluar. Semakin tinggi ketahanan keluarga yang dimiliki maka akan semakin nampak kemampuan adaptasi di dalam sebuah keluarga sebagai unit fungsional sehingga keluarga dapat mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap situasi sulit.

Ketahanan keluarga juga berhubungan dengan kemampuan keluarga dalam menjalankan sistem dan fungsi, mandiri dan berhasil menghadapi pelbagai permasalahan yang muncul, dimana keluarga dapat lebih terikat dan lebih banyak memiliki sumber daya. Terdapat sejumlah faktor yang berhubungan atau berperan dalam ketahanan keluarga, yakni kondisi psikologis keluarga tersebut, relasi antara orang tua dengan anak, dukungan sosial, pengalaman keluarga dalam menghadapi kesulitan, serta waktu yang dihabiskan dalam aktivitas keluarga.

Komponen yang memengaruhi ketahanan keluarga yaitu sistem kepercayaan, pemaknaan terhadap kesulitan atau penderitaan yang dimiliki, cara pandang yang positif, keyakinan kepada Tuhan, bagaimana pengelolaan keluarga berlangsung, fleksibilitas seluruh anggota keluarga, keterhubungan antar anggota keluarga, sumber daya sosial, sumber daya perekonomian, komunikasi antar anggota keluarga, proses pemecahan masalah yang sering dilakukan, kejelasan aturan dalam keluarga, keterbukaan dalam ekspresi emosi, dan kerja sama yang terbangun di dalam keluarga itu sendiri. Ketahanan keluarga akan menguat ketika seluruh anggota keluarga memiliki tujuan dan arah pandang yang sama, meskipun dengan cara dan sudut pandang berbeda.

C. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah *micro-skills method* atau sering juga disebut *microteaching*. *Microteaching* yaitu teknik pelatihan yang diorientasikan untuk mengajarkan keterampilan mengajar. Dalam metode ini, pelatih atau pengajar menggunakan situasi dan pengajaran nyata untuk mengembangkan keterampilan tertentu, dalam hal ini adalah mengenai keterampilan ekoliterasi dan pengembangan kapabilitas inovasi keluarga penerima manfaat. Selain itu, dalam program pelatihan, sasaran dibantu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang seni mengajar, sehingga diharapkan pendamping PKH dapat mengaplikasikan metode pengajaran yang menarik bagi para keluarga penerima manfaat.

Metode ini merupakan yang terbukti untuk mencapai peningkatan besar dalam pengalaman instruksional. Melalui

microteaching, pendamping PKH diorientasikan dapat melakukan pengajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran orang dewasa dan berbasis pengalaman nyata.

Perubahan tingkah laku melalui pembelajaran berbasis aktivitas, latihan, atau pengalaman merupakan salah satu yang menjadi fokus pada strategi pembelajaran. Ketika pendamping PKH dapat dipandang lebih berpengalaman, maka belajar menjadi lebih efektif. Kualitas terpenting dari peserta sesi *microteaching* adalah kemampuan untuk memberi dan menerima umpan balik yang konstruktif dengan pikiran terbuka dan mencapai tujuan belajar-mengajar yang tepat. Selain itu, meningkatkan kepercayaan diri pendamping untuk melakukan pendampingan dalam suasana persahabatan.

Microteaching yang dimaksud melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merencanakan. Tahap perencanaan berbasis dari tujuan pembelajaran setiap pertemuan. Tahap ini meliputi persiapan pengajaran baik itu yang berupa sarana prasarana, media, sampai pada materi yang akan diajarkan. Materi yang diajarkan mulai dari konsep, konteks, hingga panduan implementasi setiap unsur dalam keterampilan ekoliterasi dan kapabilitas inovasi di kalangan keluarga penerima manfaat. Materi yang harus dipersiapkan dalam konteks *micro-skills* yang harus diatur dalam urutan logis. Konten harus ringkas, tepat, relevan, dan dapat mencakup durasi yang ditentukan.
2. Mengajar. Proses mengajar disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dirumuskan. Pendamping menggunakan sumber daya fisik dan nonfisik untuk menunjang keefektifan pembelajar. Konteks karakteristik dan kebutuhan peserta,

yakni para keluarga penerima manfaat merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian dalam mengajar. Pengajaran menggunakan pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa, dan berbasis pengalaman (*experiential learning*). Setelah memahami konsep dan komponen masing-masing keterampilan inti mengajar, peserta harus menyiapkan pelajaran mikro untuk setiap keterampilan mengajar inti, dan menerapkan satu keterampilan dalam setiap sesi *microteaching* secara berurutan.

3. Mengamati. Dalam proses mengajar, pendamping PKH harus mengamati dinamika pembelajaran, baik itu dari segi interaksi, keterlibatan dalam sesi pelatihan, maupun ekspresi pemahaman yang ditunjukkan oleh para peserta.
4. Merencanakan ulang. Pada tahap merencanakan ulang para pendamping PKH mengacu pada hasil evaluasi dan observasi pertemuan sebelumnya. Akan ditemukan hal-hal yang harus dipertahankan, dikembangkan, sampai hal yang dieliminasi dalam pembelajaran. Perencanaan ulang ini dimaksudkan untuk mengoreksi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran sebelumnya.
5. Mengajar ulang. Setelah perencanaan dikoreksi dan dimodifikasi sesuai dengan hasil pengamatan, maka pendamping PKH akan melakukan pengajaran ulang. Pada pengajaran ulang ini pendamping sudah memiliki input yang lebih kaya dibandingkan pengajaran sebelumnya. Sama seperti pengajaran sebelumnya, setelah memahami konsep dan komponen masing-masing keterampilan inti mengajar, peserta harus menyiapkan pelajaran mikro untuk setiap keterampilan mengajar inti, dan menerapkan satu keterampilan dalam setiap sesi *microteaching*

secara berurutan.

6. Mengamati kembali. Pengamatan kembali perlu dilakukan agar efektivitas pembelajaran dapat terus dikembangkan. *Feedback* dari peserta menjadi unsur yang penting sekali dalam proses pengamatan kembali. Hasil pengamatan kembali akan jadi bahan perbaikan pada *microteaching* selanjutnya.

D. Dampak instruksional

Dampak instruksional melalui strategi *micro-skills* atau *microteaching* mengenai keterampilan ekoliterasi dan peningkatan kapabilitas inovasi yaitu:

1. Terdapatnya simulasi keterampilan mikro yang menyerupai kondisi nyata.
2. Terdapatnya fase pelatihan yang diberi feedback sehingga peserta menjadi terampil.
3. Tercipta interaksi pembelajaran dengan pendekatan orang dewasa.
4. Terwujudnya proses refleksi pengalaman dari setiap peserta yang akan memperkaya hasil belajar.
5. Kepercayaan diri peserta pelatihan meningkat.
6. Adanya umpan balik yang dapat direspon sebagai upaya perbaikan bagi pengajar dan peserta program pelatihan.
7. Tercapainya pemahaman terhadap permasalahan yang kontekstual.

BAB III

IMPLEMENTASI MODEL EKOLITERASI

A. Tujuan

Program keluarga harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Program ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan, karena tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan saja namun lebih pada upaya untuk dapat merubah pola pikir dari masyarakat. Sehingga masyarakat dapat lebih berdaya dan dapat mengangkat taraf hidupnya. Proses penyadaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah diupayakan melalui kegiatan pembelajaran berbasis kelompok yang dikenal dengan istilah Program Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau sering dikenal dengan Family Development Session (FDS).

FDS merupakan salah satu kegiatan Program Keluarga Harapan sebagai proses pendidikan berbasis kelompok yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kelompok sasaran sehingga bisa memberdayakan keluarganya tanpa bergantung uluran bantuan. Dalam pelaksanaannya, SDM PKH dalam hal ini Pendamping PKH tidak hanya bertugas sebagai fasilitator dalam penyaluran bantuan, akan tetapi juga memiliki peran menyampaikan materi-materi terkait keluarga dalam upaya memberikan penyadaran pada kelompok keluarga.

Proses pembelajaran melalui kelompok yang dilakukan oleh Pendamping PKH pada dasarnya telah berjalan dengan pemberian materi terkait pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, perlindungan

anak, serta kesejahteraan sosial. Dari pemberian materi ini tentu sedikit banyak telah memberikan pengetahuan kepada para keluarga sasaran, akan tetapi merunut dari materi yang diberikan tersebut akan lebih bermakna bilamana model pembelajaran ekoliterasi diterapkan dalam proses pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Pada prinsipnya model ekoliterasi akan lebih banyak menekankan pembelajaran yang berdasarkan potensi local/ lingkungan sekitar. Sehingga dalam prosesnya kelompok sasaran akan diajak untuk menyadari dari berbagai permasalahan dan potensi yang ada di sekitarnya, untuk dijadikan pijakan atau dasar pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang berbasis lingkungan ini tentu memberikan pandangan sederhana bagi keluarga sasaran untuk melakukan pengoptimalan potensi berdasarkan kemampuannya. Secara umum proses pembelajaran model ekoliterasi ini memiliki tujuan:

1. Meningkatkan kapabilitas inovasi

Kapasitas inovasi dimaknai sebagai kemampuan individu atau lembaga dalam menghasilkan produk/layanan, proses, pemasaran, dan sebagainya yang lebih bermakna/kebaruan (*novelty*) dan membawa manfaat. Dengan pemahaman terkait ekoliterasi maka KPM akan mengkombinasikan berbagai potensi dan sumber daya pendukung untuk meningkatkan kesejahteraannya, hal ini merupakan proses adaptasi yang dibutuhkan KPM agar mampu bertahan serta memberdayakan diri terutama pada era pandemi Covid-19 seperti saat ini. Kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini mau tidak mau membuat keluarga pra sejahtera dituntut untuk dapat bertahan dengan memanfaatkan dan mengembangkan berbagai potensi yang ada, sehingga model

ekoliterasi ini sangat layak untuk diterapkan.

2. Meningkatkan ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Melihat kondisi masyarakat di masa pandemic Covid-19 ini, banyak ketidakpastian yang timbul karena pekerjaan yang menjadi tumpuan tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga memunculkan ancaman bagi ketahanan keluarga. Dengan penerapan model ekoliterasi ini diharapkan keluarga dapat meningkatkan ketahanannya melalui upaya pengelolaan potensi lokal/ sumber daya yang ada khususnya dalam upaya meningkatkan kemakmuran. Sehingga dalam perjalanannya nanti ada alternatif yang bisa diandalkan ketika pekerjaan utama yang dijadikan tumpuan tidak dapat memberikan hasil yang maksimal.

B. Materi

Ecoliteracy atau sering juga disebut dengan kecerdasan ekologi. Berasal dari kata Yunani yaitu *oikos* (“habitat”) dan *logos* (“ilmu”) yang dapat dimaknai kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya sekitarnya secara harmonis tanpa mengurangi fungsi atau merusaknya. Kecerdasan ekologi adalah kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap ekologis tempat kita berada (Goleman, 2010). Oleh karena itu penanaman sikap ramah lingkungan merupakan sikap yang harus dimiliki setiap individu. Individu yang memiliki

kesadaran mengenai lingkungan akan dapat menyelaraskan perkembangan pembangunan dengan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis antara masyarakat dan lingkungan. Namun, tentunya sikap peduli terhadap lingkungan tidak akan hadir dengan sendirinya, perlu adanya pengenalan serta pembinaan agar sikap ini dapat menjadi karakter khususnya untuk masyarakat secara luas. Sehingga dalam upaya mewujudkan kecerdasan ekologi kepada masyarakat, dalam panduan model ini memuat materi yang akan menjadi bahan pembelajaran, merunut pendapat dari Goleman et al (2010) mengemukakan lima poin untuk mengembangkan sikap *ecoliteracy* yaitu sebagai berikut:

1. *Develop empathy for all forms of life.*
2. *Embrace sustainability as a community practice.*
3. *Make the invisible visible.*
4. *Anticipate unintended consequences.*
5. *Understand how nature sustains life.*

C. Metode

Metode pembelajaran yang digunakan dalam model ekoliterasi ini adalah micro teaching. *Microteaching* yaitu teknik pelatihan yang diorientasikan untuk mengajarkan keterampilan mengajar. Dalam metode ini, pelatih atau pengajar menggunakan situasi dan pengajaran nyata untuk mengembangkan keterampilan tertentu, dalam hal ini adalah mengenai keterampilan ekoliterasi dan pengembangan kapabilitas inovasi keluarga penerima manfaat. Selain itu, dalam program pelatihan, sasaran dibantu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang seni mengajar, sehingga diharapkan pendamping PKH dapat mengaplikasikan metode

pengajaran yang menarik bagi para keluarga penerima manfaat.

Metode ini merupakan yang terbukti untuk mencapai peningkatan besar dalam pengalaman instruksional. Melalui *microteaching*, pendamping PKH diorientasikan dapat melakukan pengajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran orang dewasa dan berbasis pengalaman nyata.

Perubahan tingkah laku melalui pembelajaran berbasis aktivitas, latihan, atau pengalaman merupakan salah satu yang menjadi fokus pada strategi pembelajaran. Ketika pendamping PKH dapat dipandang lebih berpengalaman, maka belajar menjadi lebih efektif. Kualitas terpenting dari peserta sesi *microteaching* adalah kemampuan untuk memberi dan menerima umpan balik yang konstruktif dengan pikiran terbuka dan mencapai tujuan belajar-mengajar yang tepat. Selain itu, meningkatkan kepercayaan diri pendamping untuk melakukan pendampingan dalam suasana persahabatan.

D. Langkah

1. Merencanakan

Tahap perencanaan berbasis dari tujuan pembelajaran setiap pertemuan. Tahap ini meliputi persiapan pengajaran baik itu yang berupa sarana prasarana, media, sampai pada materi yang akan diajarkan. Materi yang diajarkan mulai dari konsep, konteks, hingga panduan implementasi setiap unsur dalam keterampilan ekoliterasi dan kapabilitas inovasi di kalangan keluarga penerima manfaat. Materi yang harus dipersiapkan dalam konteks *micro-skills* yang harus diatur dalam urutan logis. Konten harus ringkas, tepat, relevan, dan dapat mencakup durasi yang ditentukan.

2. Mengajar

Proses mengajar disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dirumuskan. Pendamping menggunakan sumber daya fisik dan non fisik untuk menunjang keefektifan pembelajarn. Konteks karakteristik dan kebutuhan peserta, yakni para keluarga penerima manfaat merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian dalam mengajar. Pengajaran menggunakan pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa, dan berbasis pengalaman (*experiential learning*). Setelah memahami konsep dan komponen masing-masing keterampilan inti mengajar, peserta harus menyiapkan pelajaran mikro untuk setiap keterampilan mengajar inti, dan menerapkan satu keterampilan dalam setiap sesi *microteaching* secara berurutan.

3. Mengamati

Dalam proses mengajar, pendamping PKH harus mengamati dinamika pembelajaran, baik itu dari segi interaksi, keterlibatan dalam sesi pelatihan, maupun ekspresi pemahaman yang ditunjukkan oleh para peserta.

4. Merencanakan ulang

Pada tahap merencanakan ulang para pendamping PKH mengacu pada hasil evaluasi dan observasi pertemuan sebelumnya. Akan ditemukan hal-hal yang harus dipertahankan, dikembangkan, sampai hal yang dieliminasi dalam pembelajaran. Perencanaan ulang ini dimaksudkan untuk mengoreksi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran sebelumnya.

5. Mengajar ulang

Setelah perencanaan dikoreksi dan dimodifikasi sesuai dengan hasil pengamatan, maka pendamping PKH akan melakukan

pengajaran ulang. Pada pengajaran ulang ini pendamping sudah memiliki input yang lebih kaya dibandingkan pengajaran sebelumnya. Sama seperti pengajaran sebelumnya, setelah memahami konsep dan komponen masing-masing keterampilan inti mengajar, peserta harus menyiapkan pelajaran mikro untuk setiap keterampilan mengajar inti, dan menerapkan satu keterampilan dalam setiap sesi *microteaching* secara berurutan.

6. Mengamati kembali

Pengamatan kembali perlu dilakukan agar efektivitas pembelajaran dapat terus dikembangkan. *Feedback* dari peserta menjadi unsur yang penting sekali dalam proses pengamatan kembali. Hasil pengamatan kembali akan jadi bahan perbaikan pada *microteaching* selanjutnya.

E. Media

Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran model ekoliterasi sangat ditentukan oleh tahapan pembelajaran. Dalam tahap penyampaian materi tentu media yang dibutuhkan adalah modul, ATK, LCD ataupun media pendukung pembelajaran lainnya. Sedangkan dalam proses pembelajaran berbasis masalah/potensi/lingkungan maka dapat memanfaatkan lingkungan sekitar beserta media pendukung lainnya untuk menunjang kebutuhan pembelajaran kelompok sasaran.

F. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran model ekoliterasi bagi keluarga penerima manfaat PKH adalah melalui *Self evaluation*. *Self evaluation* adalah adalah prosedur sistematis untuk mengamati,

menganalisis, dan menilai tindakan profesional diri sendiri dan hasilnya untuk menstabilkan atau memperbaiki kinerja tersebut. Ini dapat terjadi pada individu atau pada tingkat organisasi. Mengevaluasi diri berarti orang mengeksplorasi dan mengevaluasi pekerjaan profesional mereka sendiri.

Dalam evaluasi diri, seseorang akan memiliki kesempatan untuk merefleksikan diri dan mempertimbangkan apa kekuatan dan kelemahannya. Hal ini menjadi penting dalam proses pembelajaran orang dewasa yang sangat menghargai pengetahuan/ pengalaman seseorang. Sehingga kelompok sasaran dalam pembelajaran model ekoliterasi ini tidak memiliki kesenjangan dengan peserta pembelajaran lainnya, karena yang dapat menilai kebermanfaatan maupun kekurangannya adalah dirinya sendiri, hal ini tentu akan menjadi motivasi lebih bagi peserta pembelajaran untuk meningkatkan potensi-potensi diri maupun lingkungannya untuk mencapai kapabilitas dan ketahanan keluarga.

Daftar Pustaka

- A. Terry Rambo dan Percy E. Sajise. (1984). "Human Ecology Research by Social Scientist on Tropical Agroecosystem." In *An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural Systems in Southeast Asia*. Los Banos: University of the Philippines.
- Abdullah, O. S. (2017). *Ekologi manusia dan pembangunan berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers.
- Anwas. (2019). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.
- Anwas, M. O. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.
- Arjana, I. G. B. (2013). *Geografi Lingkungan Sebuah Introduksi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
-

- Capra, F. (2011). Ecological Literacy. *Journal of Draft Global Issues Pilot August*, 1.
- Davis, K. (1960). *Human Society*. The Mac Millan Company.
- Edi Suharto. (2015). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama.
- Egan, D., Hjerpe, E. E., & Abrams, J. (2011). Why people matter in ecological restoration. *Human Dimensions of Ecological Restoration: Integrating Science, Nature, and Culture*, 1–19.
- Goleman, D. (2010). Why leading sustainability matters more than ever. *People & Strategy*, 33(1), 7–9.
- Hart, J. L., Turnbull, A. E., Oppenheim, I. M., & Courtright, K. R. (2020). Family-centered care during the COVID-19 era. *Journal of Pain and Symptom Management*, 60(2), e93–e97.
- Ihsan, A. (2019). Masyarakat Pasca-Literasi sebagai Fenomena Baru Revolusi Digital. *Prosiding Sendipa, Adiwidya VIII*.
- Institute., W. B. (2005). *Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual*.
- Jim Ife. (2008). *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Longman.
- Julian Gonsalves, Thomas Becker, A. B., Dindo Campilan, H. D. C., Elizabeth Fajber, M. K., & Vernooy, J. R.-C. and R. (2005). Decentralized Participatory Plant Breeding: A Case from Syria. In *Participatory Research and Development for Sustainable Agriculture and Natural Resource Management A SOURCEBOOK: VOLUME 1: Understanding Participatory Research and Development*.
-

- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES.
- Kusumawardani, E., Nurmalasari, Y., & Rofiq, A. (2023). Ecoliteracy Competence Assessment to Improve Innovation Capability in a Rural Community. *Journal of Education Research and Evaluation*, 7(1), 61–69. <https://doi.org/10.23887/jere.v7i1.54103>
- Laksono, B. A., & Rohmah, N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.17977/um041v14i1p1-11>
- Locke, Steven & Russo, Ricardo & Montoya, C. (2013). Environmental education and eco-literacy as tools of education for sustainable development. *Journal of Sustainability Education -*.
- Mardikanto, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Marten, G. G. (2001). *Human ecology: Basic concepts for sustainable development*. Earthscan.
- McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., & Borrie, W. T. (2013). Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here? *Ecosphere*, 4(5), 1–20.
- Momeni, M., Nielsen, S.B., & Kafash, M. H. (2015). *Determination of Innovation Capability of Organizations: Qualitative Meta Synthesis and Delphi Method*.
-

- Munawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS, I(2)*, 87–99.
- Muslim, A. (2009). *Metodologi Pengembangan masyarakat*. Teras.
- Nainggolan, T. (2019). Aspek Gender Dalam Program Keluarga Harapan. *Sosio Informa, 5(1)*, 1–14. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1593>
- Nasdian, T. F. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Payne. (1997). *Modern Social Work Theory*. Macmillan Press.
- Prijono, O.S., Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS.
- Prof. Dr. Rusmin Tumanggor. M.A, D. (2010). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Kencana.
- Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Bumdes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). *Publika, 8(5)*, 1–2. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/36725>
- Reskiaddin, L. O., Yulia Anhar², V., Sholikah, S., & Wartono, W. (2020). Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Daerah Semi-Perkotaan : Sebuah Evidence Based Practice di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Jambi, 4(2)*, 43–49. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i2.10569>
-

- Risna Resnawaty, S. A. S. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial. *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, 4(1), 1–140.
- Rusmana, N. E. A. A. (2017). Pembelajaran Ekoliterasi Berbasis Proyek Di Sekolah Dasar. *Jurnal Edukasi*, 1(1).
- Sapanca, P. L. Y. E. (2015). *Efektivitas Ekoliterasi Dalam Meningkatkan Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Masyarakat Mengenai Education For Sustainable Development Berbasis Tanaman Pangan Lokal (Studi Kasus Di Kecamatan Bangli)*.
- Smith, C. (2007). Education and Society: The Case for Ecoliteracy. *Education and Society*.
- Soerjani, M. (2012). *BIOL4417 Ekologi Manusia*. Universitas Terbuka.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soeryo, A. (2007). *Ekologi Manusia*. Institut Pertanian Bogor.
- Soetomo. (2013). *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. PT Refika Aditama.
- Sujarwo, Trisanti, dan F. U. S. (2017). PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA WISATA MELALUI PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpipfip.v10i1.16798>

- Sujarwo, E. K. (2021). *Analisis Kebutuhan Masyarakat*. Rajagrafindo press.
- Sujarwo, S., Trisanti, T., & Kusumawardani, E. (2022). Digital literacy model to empower women using community-based education approach. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 14(1), 175–188. <https://doi.org/10.18844/wjet.v14i1.6714>
- Sukhemi, S., & Maisaroh, S. (2019). Pembentukan Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Budaya Kewirausahaan Untuk Mengurangi Pengangguran Dan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 31–38. <https://doi.org/10.32639/jiak.v8i1.284>
- Sumodiningrat, G. (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan*. Impac.
- Sutton, M. Q., & Anderson, E. N. (2013). *Introduction to cultural ecology*. Rowman & Littlefield.
- Theresia, A. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Uphoff, C. and. (1997). *Feasibility and Application of Rural Development Participate*. Cornell University.
- Waridin, W., Dzulkhijiana, A., & Mafruhah, I. (2018). Community empowerment in rural infrastructure development program. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(1), 8–14. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss1.art2>
- Yustikasari., D. dan Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
-

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Pustaka Kencana Prenada Media Group.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekoliterasi

Konsep yang diberikan dalam ecoliteracy adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap bekerjanya prinsip-prinsip ekologis dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat mencapai tingkat kesadaran tinggi mengenai pentingnya lingkungan. Kondisi lingkungan selama ini hanya dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tanpa melihat keberlanjutan dari fungsi lingkungan tersebut. Oleh karena itu, meleak lingkungan saat ini menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Ecoliteracy mengajarkan masyarakat untuk berempati terhadap lingkungan secara seimbang terhadap apa yang sudah diberikan oleh lingkungan kepada manusia atau masyarakat. Masyarakat juga semakin memahami semua bentuk kehidupan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait peran alam bagi manusia atau masyarakat yang selama ini telah menopang kehidupan masyarakat.



UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274 - 589346

E-Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)